



**PERAN TNI AD DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
PERTAHANAN NEGARA MELALUI PENGEMBANGAN
STRATEGI PEMBINAAN PROFESIONALISME
(Studi Kasus Pada Satuan Operasional Jajaran Korem 022/PT)**

TESIS

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Pertahanan
Universitas Pertahanan Indonesia**

Oleh

AGUS SULARSO

Nomor Pokok Mahasiswa: 120090101010

**Program Studi Strategi Perang Semesta
Sekolah Strategi Perang Semesta
Universitas Pertahanan Indonesia**

**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
2010**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN TNI AD DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
PERTAHANAN NEGARA MELALUI PENGEMBANGAN
STRATEGI PEMBINAAN PROFESIONALISME
(Studi Kasus Pada Satuan Operasional Jajaran Korem 022/PT)**

Oleh :

Agus Sularso

Nomor Pokok Mahasiswa : 120090101010

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pertahanan pada program studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, Agustus 2010

DISAHKAN OLEH:

1. Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum , (.....): Pembimbing I
2. Dr. Ir. Bambang K. Hadi , (.....): Pembimbing II
3. Dadi Susanto, SH. MH , (.....): Penguji I
4. Dr. U.H. Harahap, M.Si , (.....): Penguji II
5. Yohanes Sulaiman, Ph.D , (.....) : Penguji III

Mengetahui
Komandan Sekolah Strategi Perang Semesta

Sonny ES Prasetyo, MA
Brigadir Jenderal TNI

ABSTRACT

Name : Agus Sularso
Study Program : Total Defense Strategy
Title : Army role of capacity building National Defense through the development of professionalism managing strategy (Case study on the operational unit row Command Military Resorts 022/PT)

This thesis discusses the strategy of coaching professionalism and their implications for the implementation of the role of the army in order to improve the country's defense capabilities. The problem is the subject of assessment is how to manage professionalism development strategies, so that the role of the army can be optimized. The purpose of this paper to obtain alternative professionalism development managing strategy in order to build a strong national defense system. This research is a qualitative descriptive design with models of SWOT analysis. The results suggest that to achieve the professionalism of heroism and professionalism of the institutional need for revitalization of the Army educational institutions, the intensification of training programs, and restructuring of the power balance between the deployment of Army personnel Administrative Unit Base accordance with TOP/DSPP, and standardize of defense equipment

Key words:

Strategy, Professionalism, Role, National Defense

ABSTRAK

Nama : Agus Sularso
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Judul : Peran TNI AD dalam peningkatan kemampuan Pertahanan Negara melalui pengembangan strategi pembinaan profesionalisme
(Studi kasus pada satuan operasional jajaran Korem 022/PT)

Tesis ini membahas tentang strategi pembinaan profesionalisme dan implikasinya terhadap implementasi peran TNI AD dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Masalah yang menjadi pokok pengkajian adalah bagaimana mengembangkan strategi pembinaan profesionalisme, agar peran TNI AD dapat dioptimalkan. Tujuan penulisan ini untuk memperoleh alternatif pengembangan strategi pembinaan profesionalisme guna mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis model SWOT. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mewujudkan profesionalisme keprajuritan dan profesionalisme institusional perlunya revitalisasi lembaga pendidikan TNI AD, intensifikasi program latihan, dan penataan perimbangan gelar kekuatan personel Satminkal TNI AD sesuai dengan TOP/DSPP, serta standarisasi alutsista.

Kata kunci:

Strategi, Profesionalisme, Peran, Pertahanan Negara

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Agus Sularso

NPM : 120090101010

Tanda Tangan :

Tanggal : Agustus 2010

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Sularso
NPM : 120090101010
Program Studi : Strategi Perang Semesta
Departemen : Pertahanan
Fakultas :
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : *"Peran TNI AD dalam peningkatan kemampuan Pertahanan Negara melalui pengembangan strategi pembinaan profesionalisme (Studi kasus pada satuan operasional jajaran Korem 022/PT)"* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Agustus 2010
Yang menyatakan

(Agus Sularso)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Pertahanan, Program Studi Strategi Perang Semesta pada Universitas Pertahanan Indonesia. Saya menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis, sangat bermanfaat dalam memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua dorongan dan perhatiannya kepada:

- (1) Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum dan Dr. Ir. Bambang K. Hadi selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis hingga selesai;
- (2) Korem 022/PT, Kodim 0207/SML, dan Yonif 126/KC yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Orang tua dan keluarga saya yang telah banyak memberikan dukungan semangat, doa dan moril; serta
- (4) Sahabat dan teman sejawat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata saya senantiasa berdoa dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi upaya pengembangan pembinaan profesionalisme TNI guna optimalisasi peran TNI AD dalam mewujudkan pertahanan negara yang handal.

Jakarta, Agustus 2010

Penulis

Agus Sularso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Penelitian	6
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.6.1 Bab 1 Pendahuluan	7
1.6.2 Bab 2 Tinjauan Pustaka	7
1.6.3 Bab 3 Metode Penelitian	7
1.6.4 Bab 4 Pembahasan	8
1.6.5 Bab 5 Penutup	8
2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Peran	9
2.1.2 Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)	10
2.1.3 Pertahanan Negara	11
2.1.4 Profesionalisme	12
2.1.4.1 Pengertian	12
2.1.4.2 Profesionalisme Militer	14
2.1.4.3 Kualifikasi Profesional	15
2.1.4.4 Keahlian Dalam Profesionalisme Militer	16
2.1.4.5 Tanggungjawab Profesionalisme Militer	19
2.1.4.6 Rasa Kesejawatan (<i>Corporateness</i>)	20
2.1.5 Strategi	22
2.1.5.1 Definisi Strategi	22
2.1.5.2 Konsep Pemikiran Strategis	22
2.1.5.3 Strategi Kontemporer	25
2.1.6 Struktur Organisasi Militer (<i>Military Organization</i>)	25
2.2. Konteks Penelitian	26
3. METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan	29
3.2 Variabel dan Indikator Penelitian	29

3.2.1	Variabel Penelitian	29
3.2.2	Indikator Penelitian	29
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	30
3.4	Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan	31
3.5	Teknik Analisis Data	31
4.	PERAN TNI AD DALAM PERTAHANAN NEGARA DAN PEMBINAAN PROFESIONALISME	32
4.1	Peran TNI AD Dalam Pertahanan Negara	32
4.1.1	Sistem Pertahanan Negara	32
4.1.2	Peran TNI AD	35
4.1.3	Permasalahan Implementasi Peran TNI AD Dalam Pertahanan Negara	45
4.2	Mengapa Pembinaan Profesionalisme Penting?	47
4.2.1	Profesionalisme Militer	48
4.2.2	Pembinaan Profesionalisme dan Revitalisasi Lembaga Pendidikan TNI AD	50
4.3	Pelaksanaan Program Pembinaan Profesionalisme Satuan Operasional Jajaran Korem 022/PT	52
4.3.1	Gelar Kekuatan Korem Sebagai Sub Kompartemen Strategis	52
4.3.2	Mengukur Profesionalisme Satuan Operasional Jajaran Korem 022/PT	54
4.3.3	Kondisi Profesionalisme	56
4.3.3.1	Aspek Profesionalisme Makorem 022/PT	61
4.3.3.2	Profesionalisme Kodim 0207/SML	66
4.3.3.3	Profesionalisme Yonif 126/KC	70
4.4	Pengembangan Strategi Pembinaan Profesionalisme Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara di Korem 022/PT	75
4.4.1	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dalam Pembinaan Profesionalisme di Kesatuan Operasional Korem 022/PT	79
4.4.2	Strategi Pembinaan	81
4.5	Perspektif Profesionalisme dan Pemahaman Profesionalisme TNI AD	83
5.	PENUTUP	86
5.1	Kesimpulan	86
5.2	Saran	87
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Diagram Profesionalisme Konvensional	84
Gambar 4.2. Diagram Persepsi Profesionalisme TNI AD	85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Sebaran Responden Berdasarkan Pangkat dan Satuan	54
Tabel 4.2.	Responden Berdasarkan Pangkat, Usia, Masa Kerja dan Masa Dinas Aktif di Kesatuan Jajaran Korem 022/PT	56
Tabel 4.3.	Kondisi Profesionalisme yang Dinyatakan Oleh Responden	57
Tabel 4.4.	Kondisi Profesionalisme Makorem 022/PT	61
Tabel 4.5.	Aspek Keahlian Makorem 022/PT	63
Tabel 4.6.	Aspek Tanggungjawab Makorem 022/PT	64
Tabel 4.7.	Aspek Rasa Sejawat Makorem 022/PT	65
Tabel 4.8.	Komposisi Profesionalisme Makorem 022/PT	66
Tabel 4.9.	Kondisi Profesionalisme Kodim 0207/SML	66
Tabel 4.10.	Aspek Keahlian Kodim 0207/SML	68
Tabel 4.11.	Aspek Tanggungjawab Kodim 0207/SML	69
Tabel 4.12.	Aspek Rasa Sejawat Kodim 0207/SML	69
Tabel 4.13.	Komposisi Profesionalisme Kodim 0207/SML	70
Tabel 4.14.	Kondisi Profesionalisme Yonif 126/KC	71
Tabel 4.15.	Aspek Keahlian Yonif 126/KC	72
Tabel 4.16.	Aspek Tanggungjawab Yonif 126/KC	73
Tabel 4.17.	Aspek Rasa Sejawat Yonif 126/KC	74
Tabel 4.18.	Komposisi Profesionalisme Yonif 126/KC	75
Tabel 4.19.	Perbandingan Komposisi Profesionalisme Di Satuan Jajaran Korem 022/PT	75
Tabel 4.20.	Matriks Pernyataan Mengenai Profesionalisme.....	76
Tabel 4.21.	Matriks Analisis SWOT	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Referensi	89
Lampiran 2.	Kuesioner Penelitian	92
Lampiran 3.	Struktur Organisasi Korem 022/PT	110
Lampiran 4.	Struktur Jabatan Perwira Dalam Organisasi Korem 022/PT	111

**PERAN TNI AD DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
PERTAHANAN NEGARA MELALUI PENGEMBANGAN
STRATEGI PEMBINAAN PROFESIONALISME
(STUDI KASUS PADA SATUAN OPERASIONAL JAJARAN KOREM 022/PT)**

**Kemiliteran itu adalah urusan besar negara.
Itu adalah dasar dari hidup dan mati,
Tao dari kelangsungan hidup atau kepunahan.
Mau tidak mau seseorang menelaahnya. (Sun Tzu, 2003:23)**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi TNI melakukan perubahan yang sangat signifikan. Dalam konteks tuntutan reformasi, TNI telah melakukan berbagai penyesuaian antara lain dengan tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik praktis dan murni sebagai alat pertahanan negara. Sejalan dengan komitmen tersebut, TNI telah melakukan reformasi internal yang dikenal dengan paradigma baru peran TNI yaitu dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi, sebagai alat negara yang profesional, termasuk di lingkungan TNI AD. Sebagai sebuah organisasi militer, salah satu tantangan utama TNI AD kedepan adalah menciptakan TNI AD yang mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan. TNI AD harus dapat menjadi kebanggaan bangsa sekaligus mampu menjadi figur panutan masyarakat serta mampu membangun simpati maupun kemitraan dengan masyarakat sebagai kekuatan yang handal. Prasyarat dari semua ini adalah TNI AD harus memperbaiki citra dirinya terlebih dahulu menjadi tentara yang profesional, efektif, efisien, modern serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

Profesionalisme TNI AD pada hakikatnya merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dimana pasal 2 (d) tentang TNI, dinyatakan bahwa tentara profesional ialah tentara yang terlatih,

terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya. Berdasarkan undang-undang tersebut, TNI AD hingga saat ini terus berupaya membangun profesionalismenya sebagai alat pertahanan negara. Namun demikian strategi yang ditempuh belum menyentuh aspek mendasar yang dibutuhkan, yakni pembangunan *mind set* tentang profesionalisme dan nilai kultur profesi, yang akan melahirkan kekuatan serta kebutuhan untuk berbuat yang terbaik dan terukur pada masing-masing prajurit (Syarifudin Tippe, 2006).

Pada era reformasi dan demokratisasi, peran militer dalam mempertahankan negara dalam konteks mengisi kemerdekaan yang telah dituangkan dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas departemen. Disamping itu pertumbuhan dan pengembangan profesionalisme dipengaruhi juga oleh doktrin militer dan perubahan lingkungan yang terjadi. Artinya bahwa tingkat profesionalisme militer itu akan terus selalu diuji oleh berjalannya waktu, ataupun dihadapkan pada situasi krisis yang mungkin terjadi. Karena itu doktrin militer harus berkembang mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis dan menjadi sebuah landasan bagi penyusunan strategi militer. Salah satu dinamika perubahan lingkungan strategis dimaksud di antaranya berkenaan dengan keamanan nasional (*national security*) sebagai suatu hal yang berkaitan dengan masalah keamanan domestik dan bahkan sampai dengan keamanan internasional. Namun di Indonesia definisi keamanan nasional masih diperdebatkan ditingkat elit, karena undang-undang tentang sistem keamanan nasional sampai saat ini belum disusun/diundangkan.

Dalam teori *strategy policy*, pengertian dan ruang lingkup keamanan nasional sangat esensial sebagai landasan pemikiran untuk memformulasikan kebijakan pertahanan nasional suatu negara (*Australian maritime doctrine*, 2000:29). Beberapa elemen dalam konsep keamanan nasional meliputi *national interest* (kepentingan nasional), *national objectives* (tujuan nasional), dan *national power* (kekuatan nasional). Pertama, kepentingan nasional berkaitan erat dengan tugas pemerintah untuk menyediakan keamanan dan pelayanan bagi warga negara,

termasuk perlindungan dan keamanan kedaulatan nasional, yang dikembangkan untuk mendukung nilai-nilai dan kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dalam rangka melindungi dan memajukan kepentingan tersebut di atas, melibatkan berbagai aktifitas pemerintah, baik secara domestik maupun internasional, yang bertujuan untuk mencapai penyediaan berbagai tingkatan perlindungan dan keamanan negara bangsa (*nation state*). Ketiga, adalah yang sangat relevan dengan masalah pertahanan negara yaitu elemen kekuatan nasional. Elemen kekuatan nasional merupakan totalitas kapasitas untuk melakukan aksi dan reaksi, yang terkait dengan fungsi-fungsi pemerintah dan juga kondisi geografis, kekayaan alam, sumber daya manusia, industri dan infrastruktur, keilmuan, dan hubungan antar bangsa-bangsa. Unsur kekuatan nasional yang berdimensi aspek kekuatan pertahanan negara yaitu menyediakan kapabilitas militer. Setiap negara mempersiapkan sedini mungkin, agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan ancaman secara efektif dan efisien.

Persiapan pertahanan negara yang maksimal, akan mempengaruhi persepsi negara lain yang berniat menyerang, akan mengkalkulasikan menang atau kalah. Kemampuan ini yang disebut dengan efek dan daya tangkal (*deterrent effect*) (Sayidiman Suryohadiprojo, 2005:11). Kebijakan pertahanan (*defense policy*) diarahkan untuk menangkal dan menghadapi bentuk ancaman yang berdimensi militer, sementara respons terhadap bentuk ancaman yang berdimensi non militer ditangani oleh aktor keamanan nasional lainnya. Untuk itu strategi TNI diformulasikan, bagaimana mengorganisasikan dan menggunakan berdasarkan ancaman, kebutuhan kemampuan, dan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah. Hal inilah yang mendorong kearah pembuatan keputusan-keputusan dalam berbagai kegiatan, misalnya proyeksi kekuatan dimasa depan, kemampuan operasional, doktrin, pendidikan dan latihan, pengadaan alutsista, dan infrastruktur pendukung.

Dalam kapasitas TNI sebagai komponen utama dari kekuatan pertahanan negara, maka sasaran pembangunan profesionalisme TNI, diarahkan pada penataan

organisasi dengan modernisasi alutsista, tidak diarahkan pada penambahan personel namun lebih diutamakan kualitasnya (Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008). Penataan organisasi pada tingkat Komando Utama sebagai kompartemen strategis diarahkan untuk merampingkan organisasi sehingga menjadi lebih efektif dan berbasis kinerja, melalui perubahan sistem padat manusia menjadi padat teknologi, dan diawaki oleh personel yang berkualitas tinggi. Pada tingkat operasional, satuan setingkat Brigade dan jajarannya, penataan organisasi menggunakan model Piramida (Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008). Dalam kaitannya dengan peran TNI AD dalam peningkatan pertahanan negara, maka Komando Resor Militer (Korem) sebagai sub kompartemen strategis, adalah merupakan basis pembinaan tingkat satuan operasional. Korem memiliki beberapa satuan kewilayahan setingkat Komando Distrik Militer (Kodim) dan satuan tempur tingkat Batalyon Infanteri. Pelaksanaan pembinaan pembangunan kemampuan satuan operasional dalam jajaran Korem merupakan bagian dan upaya dari perwujudan pembangunan postur TNI AD. Pada tataran ini sesungguhnya program pembangunan profesionalisme keprajuritan tersebut diwujudkan. Profesionalisme keprajuritan dalam pandangan TNI merupakan hal yang paling esensial dalam konteks peran TNI AD dalam peningkatan pertahanan negara. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sumber daya manusia/prajurit merupakan faktor utama penentu keberhasilan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengembangan strategi pembinaan profesionalisme merupakan sarana yang dapat ditempuh sebagai implementasi peran TNI AD di bidang pertahanan negara, atau dengan kata lain terdapat signifikansi hubungan di antara profesionalisme dan implementasi peran. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul: *"Peran TNI AD dalam peningkatan kemampuan Pertahanan Negara melalui pengembangan strategi pembinaan profesionalisme (Studi kasus pada satuan operasional jajaran Korem 022/PT)"*.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah profesionalisme di lingkungan satuan operasional TNI AD bertitik tolak pada standar yang diberlakukan bagi organisasi dan para personel militer dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar tersebut meliputi tingkat keahlian dan pelayanan yang diberikan, landasan keyakinan bahwa didalam pekerjaannya bidang kemiliteran yang ditekuninya itu terkandung nilai kebenaran, yang membuat baginya pekerjaan itu lebih sebagai panggilan dan kehormatan dari pada untuk memperoleh bayaran. Penerapan standar profesi tersebut di atas pada prinsipnya merupakan implementasi dari peran TNI AD di bidang pertahanan negara, dimana hal itu akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya program pembinaan profesionalisme yang ada di lingkungan satuan operasional tersebut. Sebagai suatu program, maka pembinaan profesionalisme pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana program itu dijalankan, dan hal ini adalah kondisi-kondisi yang dapat dianalisis berdasarkan pengkategorian berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Masalah yang berhubungan dengan kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman merupakan bahan yang dapat dipergunakan dalam memproyeksikan alternatif pengembangan strategi pembinaan profesionalisme di lingkungan satuan operasional TNI AD.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan strategi pembinaan profesionalisme satuan operasional dapat mewujudkan peran TNI AD dalam peningkatan pertahanan negara. Bertitik tolak dari masalah itu, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembinaan profesionalisme satuan operasional dapat meningkatkan kemampuan TNI AD di bidang pertahanan negara khususnya matra darat?
- b. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan profesionalisme satuan operasional/Satminkal di lingkungan satuan Korem 022/PT?
- c. Bagaimana pengembangan strategi pembinaan profesionalisme satuan operasional/Satminkal agar dapat mewujudkan optimalisasi peran TNI AD dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Memahami upaya peningkatan kemampuan TNI AD di bidang pertahanan negara khususnya pada matra darat melalui pembinaan profesionalisme di lingkungan satuan operasional TNI AD.
- b. Memperoleh pengetahuan mengenai pelaksanaan program pembinaan profesionalisme satuan operasional di lingkungan satuan Korem 022/PT untuk kemudian diidentifikasi dan dianalisis faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada pelaksanaan program tersebut.
- c. Memperoleh alternatif pengembangan strategi pembinaan profesionalisme satuan operasional yang dapat mewujudkan optimalisasi peran TNI AD dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mempunyai manfaat, yaitu:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai peningkatan peran TNI AD di bidang pertahanan negara melalui pembinaan profesionalisme di lingkungan satuan operasional TNI AD.
- b. Dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pembinaan profesionalisme di satuan operasional Korem 022/PT.
- c. Diperolehnya alternatif pengembangan strategi pembinaan profesionalisme satuan operasional dalam mewujudkan optimalisasi peran TNI AD.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian didasarkan pada kebutuhan penulis dalam mengkaji dan menganalisis pertanyaan penelitian. Oleh karena itu penelitian akan mempunyai ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

- a. Batasan Masalah: Pengembangan strategi pembinaan profesionalisme satuan operasional dalam mewujudkan peran TNI AD di bidang peningkatan pertahanan negara.

- b. Batasan Obyek Penelitian: Satuan operasional yang ada lingkungan TNI AD, yaitu Satminkal di Korem 022/PT.
- c. Batasan Waktu: Pelaksanaan program pembinaan profesionalisme yang dilaksanakan pada program kerja tahun 2009 sampai dengan yang berlangsung pada saat ini.
- d. Batasan Teori dan Konsep: Profesionalisme militer, pengertian peran, pertahanan negara, dan pengembangan strategi.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan atas hasil penelitian akan dituangkan dalam uraian dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab, yaitu:

1.6.1 Bab 1 Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai pengantar penelitian yang berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan diakhiri dengan ruang lingkup penelitian.

1.6.2 Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori dan konteks penelitian. Pada uraian mengenai landasan teori akan dikemukakan teori mengenai peran, pertahanan negara, profesionalisme, dan strategi, serta struktur organisasi militer yang berasal dari pendapat para ahli sebagaimana diulas dalam literatur baik berbentuk buku maupun hasil penelitian. Sementara itu pada uraian mengenai konteks penelitian akan dibahas mengenai karakteristik penelitian yang akan dilakukan penulis dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1.6.3 Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai mekanisme dan tahapan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan.

1.6.4 Bab 4 Pembahasan

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang tersusun dalam tiga sub bahasan, yaitu peran TNI AD dalam Pertahanan Negara dan pembinaan profesionalisme, pelaksanaan program pembinaan profesionalisme satuan operasional jajaran Korem 022/PT, dan pengembangan strategi pembinaan profesionalisme sebagai upaya peningkatan kemampuan pertahanan negara di Korem 022/PT.

1.6.5 Bab 5 Penutup

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi uraian mengenai hasil penelitian dan rekomendasi penulis sebagai saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran

Istilah peran berasal dari dalam Bahasa Inggris, yaitu *role* yang mempunyai pengertian sebagai *a part played by an actor or other; a function assumed by someone else* (Webster's New Dictionary and Thesaurus, 1990:472). Sementara itu dalam tataran konsep, peran menurut Astrid S. Susanto (1985:75) diungkapkan bahwa secara disiplin keilmuan dapat ditemukan dalam ilmu sosiologi, dimana peran terbentuk disebabkan oleh adanya *prestise* dan derajat sosial dalam suatu kehidupan masyarakat. Status merupakan kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya, jadi status merupakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Sedangkan *role* atau peran merupakan suatu dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban, atau biasa disebut juga status subyektif. Harapan akan pelaksanaan peran tertentu oleh orang lain (*role expectation*) menurut Astrid S. Susanto (1985:77) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Status dari orang-orang dengan siapa individu mengadakan interaksi.
- b. Sifat dari hubungan individu dengan orang lain.
- c. Apakah individu menduduki lebih dari satu status.

Sedangkan bagaimana peran dapat dilakukan, dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa:

- a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi, yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku dalam kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama.
- b. Apabila norma jelas, barulah dapat dikatakan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya.
- c. Apabila individu dihadapkan dengan situasi dimana lebih dari satu norma (yang dikenalnya) berlaku, ia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi antara norma-norma ini.

Selain pendapat tersebut di atas peran juga diartikan sebagai peranan, menurut Soerjono Soekanto (1980:27) dinyatakan bahwa peranan merupakan pola perikelakuan yang dikaitkan dengan status atau kedudukan atau peran. Peranan ini dapat diibaratkan dengan peranan yang ada dalam suatu sandiwara, dimana para pemain mendapatkan tugas untuk memainkan sebahagian dari kriteria yang menjadi tema sandiwara tersebut. Sebagai pola perikelakuan maka dijelaskan lebih lanjut, bahwa peranan mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Peranan ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat, terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.
- b. Peranan yang dipersepsikan. Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dirumuskannya sendiri), dia harus melaksanakan peranan tertentu.
- c. Peranan yang dilaksanakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu didalam kenyataannya, yang terwujud dalam perikelakuan yang nyata.

2.1.2 Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI pasca reformasi telah mengalami perubahan peran yang sangat signifikan. TNI melakukan berbagai penyesuaian terhadap tuntutan reformasi dengan tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik praktis dan murni sebagai alat pertahanan negara. Sejalan dengan komitmen tersebut, TNI telah melakukan reformasi internal yang dikenal dengan paradigma baru peran TNI yaitu dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi. Secara ringkas paradigma baru peran TNI dimaksudkan sebagai penyesuaian konsep peran TNI pada abad 21, yang dilandasi dengan komitmen untuk:

- a. Sebagai prajurit profesional yang berperan murni sebagai alat pertahanan negara dan pembangunan bangsa.
- b. Menempatkan peran TNI sebagai bagian dari komponen bangsa, yang bertanggungjawab untuk memelihara kehidupan nasional yang sejahtera dan demokratis.

- c. Menata kembali doktrin, struktur, sisbindiklat, hukum, etika dan moral, serta kepemimpinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan reformasi peran TNI pada abad 21, TNI AD juga telah melakukan berbagai penyesuaian sejalan dengan paradigma baru peran TNI (Mabes TNI, 1999:23) . Visi TNI AD untuk mewujudkan profesionalisme ditempuh melalui program pembinaan. Tujuan pembinaan postur TNI AD diarahkan untuk menyiapkan penyelenggaraan pertahanan negara di darat, yang merupakan keterpaduan dari aspek kemampuan, kekuatan, dan gelar. Sedangkan sarannya mencakup pembinaan fungsi pertempuran, teritorial, dan pembinaan kekuatan yang profesional. Permasalahan yang muncul dalam membangun militer yang profesional, sangat tergantung dengan peran pemerintah/negara, doktrin militer, dan perkembangan lingkungan. Peran negara menjadi sangat penting dalam mengembangkan peran militer, sebab militer adalah alat negara. Kemajuan atau mundurnya perkembangan militer akan sangat ditentukan oleh kebijakan negara. Mengutip amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam konferensi TKR di Yogyakarta 12 Nopember 1946, *“Bahwa negara Indonesia tidak cukup untuk dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan diluar tentara”* (Mabesad, 2007). Peran militer dalam mempertahankan negara pada tataran operasional senantiasa mengacu dan berkaitan erat dengan doktrin militer. Doktrin bermakna sebagai mekanisme penggunaan kekuatan militer (*how to use forces*). Karenanya doktrin militer harus mengatur dan mengembangkan organisasi yang efektif, dihadapkan pada tuntutan tugas dan peran yang diberikan oleh organisasi.

2.1.3 Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah upaya untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman militer dan non militer. Pertahanan negara merupakan upaya utama untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki wilayah yurisdiksi laut yang sangat luas. Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Potensi ancaman yang tidak ringan, kondisi sosial ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI (RPJMN 2004-2009).

Pertahanan negara merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dalam menanggulangi setiap ancaman. Sistem pertahanan negara bertumpu pada komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. Sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta memiliki ciri kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia mengatur tentang penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Atas dasar itu, doktrin pertahanan negara ditetapkan sebagai pengejawantahan tekad, prinsip, dan kehendak untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Doktrin pertahanan negara selanjutnya dijadikan sebagai salah satu perangkat utama dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pertahanan negara.

2.1.4 Profesionalisme

2.1.4.1 Pengertian

Istilah profesionalisme berasal dari kata profesi yang berasal dari istilah *profession* (Bahasa Inggris), dimana dalam *Webster Dictionary*, kata *profession* adalah berasal dari kata *profess*, dalam bahasa Yunani berarti ikrar. Kata *Profes* berarti pengikrar laki-laki, *professe* pengikrar perempuan, *Professed*

berarti Rahib atau Biarawati yang sudah mengucapkan kaul. Selanjutnya dari kata *profess* timbul kata bentukan, *profession* yang didalam bahasa Latin *Professio*, yang memiliki beberapa arti (Muhadjir Effendy, 2009), antara lain:

- a. *An occupation, not purely commercial, to which one devotes oneself.* (Suatu pekerjaan yang tidak murni komersial, dimana seseorang mencurahkan seluruh dirinya).
- b. *A calling in which one profess to have acquired some special knowledge used by way either of instructing, guidening, or advising others of serving them in some art; as profession of arms, profession of teaching, profession of chemist.* (Suatu panggilan dalam mana seseorang berikrar untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan khusus melalui pelatihan, pembimbingan, atau kepenasehatan yang ia abdikan bagi orang lain dalam beberapa bidang kiat; misalnya profesi militer, profesi guru, profesi ahli kimia dan sebagainya).

Selain itu kata bentukan berikutnya adalah *professionalism* (Muhadjir Effendy, 2009:36) antara lain berarti:

- a. *Conduct, aims, qualities, etc. characteristic of, peculiar to, a profession or professional man* (tingkah laku, tujuan, sifat-sifat; karakteristik mengenai keistimewaan suatu profesi; atau manusia professional).
- b. *The characteristics, standards or methods of professionals* (karakteristik, standar atau metode profesional).

Berdasarkan arti dari asal muasal istilah profesi, maka Muhadjir Effendy (2009: 37) merumuskan pengertian profesionalisme adalah standar yang dikenakan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dengan lebih dilandasi oleh keyakinan akan adanya nilai-nilai kebenaran, kehormatan, kecintaan dan keterpanggilan di dalam pekerjaan itu; baik dalam hal menguasai keahlian yang diperlukan maupun pelayanan atas nama pekerjaan itu kepada orang lain, dari pada sekedar, atau semata-mata untuk memperoleh bayaran. Sementara itu dari kalangan para ahli lain, dalam hal ini Samuel P. Huntington (2003:8) mengajukan tiga prasyarat profesionalisme yaitu adanya keahlian (*expertise*), tanggungjawab sosial (*social responsibility*), dan adanya organisasi kesejawatan yang mengikat

(*corporateness*). Kemudian Morris Janowitz sebagaimana dikutip oleh Segal dan Schwartz, mengajukan empat sifat yaitu sebagai suatu keahlian yang sangat spesifik yang diperoleh melalui latihan yang intensif, adanya standar etika dan kinerja, adanya rasa identitas kelompok, dan adanya sistem administrasi internal (*special skill acquired through intensive training, standards of ethics and performance, a sense of group identity, system of internal administration*).

Berdasarkan pengertian istilah serta pendapat Huntington dan Janowitz tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya keahlian yang spesifik adalah bukan satu-satunya kriteria yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Memang kriteria itu mutlak karena berkenaan dengan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, namun ada kriteria yang tidak kalah penting adalah bahwa seorang profesional harus memiliki tanggungjawab sosial, memiliki standar etika dan kinerja yang secara aksiologis sebagai rambu-rambu yang memberi batas dan arah mengenai untuk apa pekerjaan itu dilaksanakan, dan bilamana pekerjaan itu harus, boleh, atau tidak boleh dilakukan (Muhadjir Effendy, 2009:37).

2.1.4.2 Profesionalisme Militer

Menurut Muhadjir Effendi (2009:38) bahwa yang dimaksudkan dengan profesionalisme militer adalah standar yang diberlakukan bagi organisasi dan para personel militer dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar tersebut meliputi tingkat keahlian dan pelayanan yang diberikan, landasan keyakinan bahwa didalam pekerjaannya bidang kemiliteran yang ditekuninya itu terkandung nilai kebenaran, yang membuat baginya pekerjaan itu lebih sebagai panggilan dan kehormatan dari pada untuk memperoleh bayaran.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, standar dalam profesionalisme militer meliputi tingkat keahlian dan pelayanan yang diberikan, landasan keyakinan yang mengandung nilai-nilai kebenaran. Adanya nilai-nilai kebenaran yang diyakini tersebut yang menyebabkan setiap profesi militer akan dengan sendirinya menjadi suatu "isme" atau sebagai suatu profesionalisme militer. Nilai-nilai tersebut di samping universal juga memiliki sifat partikular karena setiap militer profesional

merupakan bagian dari suatu masyarakat dan negara. Demikian pula nilai-nilai kebenaran yang diyakini pasti tidak terlepas dari ideologi yang diberlakukan oleh negara itu. Padahal setiap negara itu mempunyai nilai kebenaran atau ideologi yang berbeda-beda pula (Muhadjir Effendy, 2009:38).

2.1.4.3 Kualifikasi Profesional

Beberapa ahli militer berpendapat bahwa hanya para prajurit yang memiliki kualifikasi perwira (*comisioned officer*) saja yang bisa disebut militer profesional. Korps Perwira modern adalah merupakan suatu badan profesional, dan perwira modern itu adalah seorang profesional (Huntington, 2003:1 : *The modern officer corps is a professional body and the modern military officer is a professional man*). Kategori yang diajukan oleh Huntington itu menurut Amos Perlmutter dalam Muhadjir Effendy (2009:38) disebut sebagai dasar pembentukan profesionalisme militer. Sedangkan para prajurit yang berada pada tingkatan yang lebih rendah yaitu Bintara dan Tamtama adalah bukan kelompok profesional militer, melainkan adalah kelompok vokasional atau petrampil militer. Dengan status kelompok vokasi maka para Bintara dan Tamtama memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan keterampilan perorangan dan jabatannya (UTP/UTJ). Menurut Perlmutter bahwa landasan profesionalisme militer bertumpu pada dua pilar, yaitu profesionalisme personel dan profesionalisme korps. Profesionalisme personel meliputi keahlian, tanggungjawab dan kesetiaan pada korps, yang didukung adanya sifat ulet, tekun, tegar, patuh, tulus, disiplin dan mencintai pekerjaannya. Sedangkan profesionalisme korps meliputi adanya spesialisasi fungsi dan peran yang didukung oleh adanya satu sumber otoritas kekuasaan yang berasal dari masyarakat yang ada di dalam suatu negara (*nation state*) yang demokratis. Hubungan antara profesionalisme personel dan profesionalisme korps militer bersifat koheren dan saling mempengaruhi. Personel yang profesional akan membuat korpsnya menjadi lebih profesional dalam menjalankan perannya, demikian juga sebaliknya korps yang profesional akan meningkatkan profesionalisme personelnnya. Pergeseran makna profesional terjadi ketika makna istilah itu disamakan dengan bekerja untuk mendapat

bayaran. Konsekuensinya, para Bintara dan Tamtama juga disebut prajurit profesional. Dengan demikian kata prajurit profesional telah mengaburkan perbedaan antara karir Bintara/Tamtama profesional dalam arti seseorang yang bekerja di birokrasi militer dengan mendapatkan bayaran, dengan karir perwira profesional yang mengejar sebuah kehormatan dan panggilan jiwa dalam melayani masyarakat (Huntington 2003:3-4). Dalam hal tersebut, Huntington menegaskan, para Bintara dan Tamtama adalah merupakan bagian dari birokrasi organisasi militer tetapi bukan merupakan bagian dari birokrasi profesi militer. Bintara/Tamtama relatif tidak memiliki keahlian dalam arti kompetensi intelektual dan juga tidak memiliki tanggungjawab profesional sebagaimana Perwira. Bintara/Tamtama adalah para juru terampil dalam penerapan kekerasan bersenjata tetapi bukan manajer kekerasan itu sendiri. Jadi korps Perwira dan para perwiralah yang lebih memenuhi kriteria profesional. Sekalipun dalam prakteknya tidak ada satupun pekerjaan yang memiliki semua sifat profesional termasuk perwira. Namun menurut Huntington, justru keperwiraan (*officership*)-lah yang lebih mendekati kriteria ideal dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Menurut Huntington, dalam praktek, keperwiraan akan menjadi kuat dan sangat efektif jika lebih memenuhi sifat profesional yang ideal; sebaliknya keperwiraan menjadi lemah dan tidak efektif jika semakin menjauhi sifat-sifat profesional yang ideal itu (Huntington, 2003:7).

2.1.4.4 Keahlian Dalam Profesionalisme Militer

Profesi militer memiliki begitu banyak spesialisasi, termasuk spesialisasi yang sama atau mirip dengan yang dimiliki oleh profesi-profesi sipil. Misalnya di dunia militer juga terdapat pekerjaan keinsinyuran, dokter, pilot, ahli peralatan, ahli personalia, ahli komunikasi, dan sebagainya yang pada kenyataannya semua itu dapat ditemukan baik dalam organisasi sipil maupun dalam satuan organisasi militer. Didalam satuan organisasi militer keahlian tersebut sangat dibutuhkan sebagai apa yang disebut dengan bantuan tempur (*combat support*) maupun bantuan administrasi (*non-combat support*). Menurut Muhadjir Effendy (2008:40) bahwa yang paling kontras profesi militer di banding

profesi sipil adalah dalam hal manajemen kekerasan. Didalam organisasi militer terdapat berbagai sumber kekuatan kekerasan baik berupa personel, peralatan dan persenjataan. Juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam hierarki yang sangat ketat disamping berdasar jenis kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan. Hal tersebut menjadikan pekerjaan militer sangat unik. Pengelolanya pun memerlukan kemampuan yang sangat khusus. Kemampuan itulah yang menjadi kompetensi utama para prajurit Perwira. Kemampuan itu pula yang membedakan mereka dengan para prajurit Tamtama. Hal ini menurut Harold D. Lasswell (1941) menyebutnya keahlian perwira itu sebagai spesialis di bidang manajemen kekerasan. Para perwira disebutnya sebagai seorang manajer kekerasan (*the manager of violence*). Tujuan utama pengelolaan kekerasan adalah berhasil memenangi pertempuran. Untuk itu tugas perwira sebagai militer profesional adalah meliputi: (1) mengorganisasi, memperlengkapi dan melatih angkatan bersenjata, (2) merencanakan operasinya, (3) mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasinya baik dalam pertempuran maupun di luar pertempuran (Huntington, 2003:8). Hasil akhir dari tugas tersebut adalah terciptanya keamanan umum yang menurut Huntington disebut sebagai keamanan militer (*military security*).

Huntington, misalnya membagi jenis keamanan kedalam tiga katagori yaitu; (1) keamanan militer (*military security*), (2) keamanan internal (*internal security*), dan (3) keamanan situasional (*situational security*). Pertama, keamanan militer meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk mengurangi atau menetralkan berbagai usaha yang akan melemahkan atau menghancurkan negara dengan menggunakan kekuatan senjata yang dioperasikan dari luar batas-batas institusional dan teritorialnya. Kedua, keamanan internal yaitu kegiatan yang berhubungan dengan upaya menetralkan ancaman subversi, yaitu usaha untuk melemahkan atau menghancurkan negara dengan berbagai kekuatan yang dioperasikan di dalam batas-batas institusional dan teritorial negara itu. Ketiga, keamanan situasional adalah menyangkut ancaman penghancuran yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu sebagai akibat

dari adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan politik dengan cara menggerogoti dan merongrong kekuatan negara.

Dengan menyetengahkan tiga kategori tersebut secara implisit Huntington membatasi wilayah tugas pokok militer adalah hanya terbatas pada keamanan militer (*military security*) saja. Yaitu menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi ancaman keamanan yang berasal dari luar atau ancaman dari negara merdeka yang lain. Pandangan ini jelas beda dengan mereka yang berkeyakinan bahwa munculnya militer sebagai aparatur negara adalah pertama-tama memiliki tugas domestik, yaitu menciptakan keamanan umum dengan cara mengatasi, memonopoli dan menetralisasi kekerasan yang ada di masyarakat baik secara individu maupun bersama. Mengapa Huntington menolak peran militer diluar tugas keamanan militer (eksternal). Ia menyatakan bahwa syarat agar korps militer menjadi profesional adalah: pertama, adanya spesialisasi fungsi dan pembagian kerja. Sebab, adalah tidak mungkin menjadi seorang yang ahli dalam bidang pengelolaan kekerasan (militer) untuk pertahanan dan pada saat yang bersamaan ahli juga dalam bidang politik, kenegaraan atau keamanan dalam negeri. Merujuk pada pendapat tersebut, secara tidak langsung ia menyatakan bahwa korps militer akan profesional apabila hanya menjalankan satu peran yaitu hanya keamanan militer. Bahkan dengan tegas ia katakan apabila militer dibiarkan ikut campur dalam dunia politik, akan menyebabkan *political decay*. Kedua, seorang perwira yang profesional dikaruniai kekuatan pemikiran untuk melayani negara. Dalam prakteknya, ia harus setia pada satu institusi tertentu yang pada umumnya diterima sebagai perwujudan dari otoritas suatu bangsa. Ketika ada otoritas-otoritas yang saling bersaing dan militer menjadi bagian dari salah satu pihak, atau terpecah ke beberapa pihak, maka profesionalisme akan menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, dalam profesionalisme militer perlu ditiadakan perselisihan antar pihak dan konflik politis, sebagai langkah pencegahan agar otoritas yang saling bersaing tidak memaksakan diri untuk membangun kekuatan militer, atau kemungkinan terjadi penyaluran pengaruh politik kedalam militer dilakukan melalui beberapa lembaga formal

pemerintahan. Singkatnya, argumen di atas menekankan bahwa agar korps militer dan personelnya menjadi profesional, maka mereka harus bersikap netral dalam politik dan tidak memihak pihak-pihak tertentu. Ketiga, bangkitnya berbagai pemikiran dan partai-partai demokratis, dimana ide demokrasi itu sendiri pada dasarnya merupakan sistem untuk mengorganisasikan institusi-institusi politik. Namun, sering para pendukungnya berusaha membentuk institusi-institusi militeristis atau menarik elemen militer kedalamnya. Oleh karena itu, korps militer jangan sampai menjadi sebuah partai politik, bertujuan politik, dan menjadi bagian partai politik tertentu. Selain itu, personelnya juga tidak boleh menjadi anggota partai politik atau mendukung partai tertentu.

2.1.4.5 Tanggungjawab Profesional Militer

Keahlian perwira profesional yaitu di bidang manajemen kekerasan memiliki implikasi pada keharusan adanya tanggungjawab sosial yang sangat besar. Sebab produk dari keahlian ini adalah berupa barang publik (*public goods*) yaitu berupa keamanan. Sebagaimana halnya barang publik, keamanan yang dihasilkan oleh profesi militer memiliki dua karakteristik yaitu *non-rivalry* dan *non-excludability*. *Non-rivalry* maksudnya bahwa jasa keamanan ini tidak dapat dipersaingkan melalui mekanisme pasar. Karena hampir bisa dipastikan, tidak bisa diberlakukan hukum permintaan-penawaran (*demand and supply*) terhadapnya. Semua orang butuh dan ingin mengambil manfaat atas produk keamanan namun semua orang juga ingin menjadi penumpang gratis (*free riders*). Maka mau tidak mau tanggungjawab atas pengadaannya harus diambil alih oleh negara. Oleh karena itu institusi militer termasuk didalamnya organisasi profesi (korps perwira) yang menyediakan jasa ini adalah bagian dari birokrasi negara. Tenaga profesional yang memprodukannya (para perwira) juga adalah sebagai aparatur negara. *Non-excludability* maksudnya bahwa jasa keamanan ini tidak bisa diperkecualikan untuk orang atau kalangan tertentu saja. Semua orang memiliki peluang yang sama untuk mengambil manfaat darinya. Kalau toh harus diperkecualikan, secara teknis akan sangat sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tanggungjawab sosial yang sangat besar

dari para perwira dapat diargumentasikan dari tingkat campur tangan negara. Hampir untuk semua profesi, negara hanya bertindak sebatas membuat aturan dan mengawasi berlakunya aturan itu bagi badan ataupun anggota profesi. Namun untuk profesi militer ini negara bertindak lebih jauh yaitu melakukan monopoli. Kemudian hal yang juga terkait dengan tanggungjawab dalam profesionalisme militer adalah motivasi profesional dari perwira militer.

Menurut Huntington, motivasi profesional militer adalah bahwa ia tidak bertindak lantaran insentif ekonomi. Tingkah lakunya dalam menjalankan profesinya tidak diatur oleh imbalan ekonomis. Perwira adalah bukan prajurit upahan, yang seperti pemain bola profesional bisa memindahkan jasa pelayanannya kepada pihak mana saja yang bisa memberi upah lebih menguntungkan. Juga bukan tentara suka rela yang tindakannya terinspirasi oleh semangat juang dan patriotisme semata, tanpa ada upaya yang sistematis terencana untuk peningkatan dan penyempurnaan kemampuan secara terus menerus (Huntington, 2003:16). Motivasi seorang militer profesional didasari oleh: (1) adanya keyakinan terhadap suatu nilai kebenaran, (2) cinta terhadap pekerjaan dan keahlian yang ia kuasai, serta (3) rasa tanggungjawab sosial dalam menggunakan keahliannya itu demi kepentingan masyarakat luas. Dipihak lain masyarakat melalui agennya yaitu negara harus bisa menjamin bahwa motivasi seperti ini akan terus terpelihara dengan cara memberikan honorarium yang layak sebagai penghargaan atas pengorbanan mereka, baik pada saat sedang aktif bertugas maupun tidak. Perilaku perwira dalam hubungannya dengan masyarakat dipandu oleh sebuah kesadaran bahwa keahliannya hanya dapat dipergunakan untuk maksud dan tujuan yang diizinkan oleh masyarakat melalui agennya yaitu negara. Jadi tanggungjawab perwira militer adalah terhadap negara (Huntington, 2003:13).

2.1.4.6 Rasa Kesejawatan (*Corporateness*)

Bertitik tolak dari asumsi bahwa keperwiraan adalah merupakan profesi yang bersifat birokrasi publik, maka produk yang dihasilkan juga berupa barang publik (*public goods*), yaitu jasa keamanan umum. Karena demikian penting

produk jasa keamanan ini membuat profesi militer menuntut keahlian yang kompleks dalam institusi yang eksklusif. Hal itu membuat korps perwira berada dalam sebuah unit sosial yang eksklusif mandiri. Unit ini hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu yang diwajibkan (Muhadjir Effendy, 2009:45-46). Struktur kesatuan korps perwira tidak hanya meliputi birokrasi resmi, tetapi juga berupa lingkungan masyarakat yang eksklusif. Para perwira secara fisik dan sosial mungkin memiliki hubungan non-profesional yang paling sedikit dibanding dengan para profesional lainnya. Eksklusifitas perwira terhadap orang awam dilambangkan dengan seragam, pangkat, dan tata cara hidup mereka (Huntington, 2003:14).

Disamping keperwiraan itu merupakan profesi birokratis, organisasinya yaitu korps perwira juga merupakan organisasi birokratis pula. Dalam hal profesi birokratis, tingkat kemampuan dibedakan dengan hierarki kepangkatan; sedang dalam hal organisasi birokratis pembagian pekerjaan dibedakan dalam hierarki jabatan. Setiap pangkat yang disandang yang melekat pada pribadi perwira mencerminkan keberhasilan dan derajat keprofesionalan yang telah dicapai; yang diukur berdasarkan pengalaman, senioritas, pendidikan dan kemampuan. Penentuan pangkat dan jabatan biasanya dilakukan oleh korps perwira itu sendiri. Sifat pekerjaan profesi militer adalah tergolong korporasional sebagai lawan dari asosiasional. Tingkat keberhasilan kinerjanya sangat ditentukan oleh kerjasama, kohesivitas dan solidaritas antar anggotanya. Dalam dunia militer tidak dikenal bekerja sendirian. Karena itu satuan terkecil organisasi militer adalah bukan individu-individu, tetapi regu, *scuad* atau group dalam sebuah kerjasama dan saling tergantung. Ikhwil kerjasama dan saling ketergantungan dalam pekerjaan militer ini sangat penting karena bukan hanya berkenaan dengan masalah kegagalan dan keberhasilan sebuah tugas semata tetapi juga menyangkut hidup-mati. Oleh sebab itu profesi militer jika dibandingkan dengan profesi lain lebih sangat memerlukan kuatnya rasa kesejawatan atau *Esprit de corp* yaitu perasaan setia dan bela teman serta saling menghormati antar anggota kesatuan (Salim Said, 2000).

2.1.5. Strategi

2.1.5.1 Definisi Strategi

Menurut Robert (2002), strategi pada dasarnya adalah kegiatan yang pragmatis dan praktis. Teori strategi adalah sebuah teori aksi. Hal ini menyangkut studi tentang bagaimana hal tersebut dilakukan dan menjadi panduan untuk mencapai tujuan obyektivitas dan mendapatkannya dengan cara yang seefisien mungkin. Studi tentang strategi tidak dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin. Strategi adalah subyek yang memfokuskan diri pada kekuatan militer tanpa adanya parameter yang jelas (John Baylis, James J. Wirtz, Eliot Cohen & Colin S. Gray, 2002). Menurut Clausewitz tentang perang digambarkan dengan pendekatannya terhadap strategi yang tidak ubahnya sebuah pertarungan dimana ketegangan yang melekat antara tujuan dari sebuah kebijakan dan juga kekerasan di sekitarnya harus mencapai satu kata sepakat atau perdamaian. Jadi pada akhirnya tidak ada solusi militer yang bersifat murni atas segala problem strategi. Obyektivitas dari kemiliteran berasal dari tujuan politis, dan sebaliknya rencana strategis didefinisikan dengan penuh obyektivitas. Tujuan utama dari teori strategi adalah untuk menjaga kegunaan perang dengan membatasi *social cost* atau perang itu sendiri. Dengan berkembangnya efisiensi dalam militer, muncul ide bahwa perang dapat menjadi sesuatu yang cepat dan tajam dengan memperkenalkan pembatasan atas dinamika sosial. Ide ini adalah bencana besar dalam *miss* kalkulasi strategi pada zaman modern, karena mempunyai dasar pra asumsi sosial dibandingkan dengan pelaku militer yang profesional. Ini berarti bahwa perang modern, yang ada hanyalah sumber ekonomi dan ketahanan sosial yang terbukti lebih penting dari pada strategi dan kekuatan militer yang ada.

2.1.5.2 Konsep Pemikiran Strategis

Mengutip tulisan Rizal Sukma (1995), tentang pergeseran konseptual doktrin strategis Cina pasca Mao dari perang rakyat ke perang rakyat dalam kondisi modern. Keberhasilan Deng Xiaoping dalam memperkuat posisinya sebagai orang nomor satu di Cina dengan prinsip praktek adalah satu-satunya kriteria kebenaran. Para pemikir Cina mulai mengkritik pemikiran militer warisan Mao. Artikel Su Yu memperkenalkan istilah perang rakyat dalam kondisi modern.

Beberapa prinsip yang dikembangkan oleh Mao sudah tidak cocok lagi dengan kondisi perang masa depan, dan karena itu dibuat terobosan-terobosan baru. Sejak itu dorongan untuk mengadakan perubahan doktrin-doktrin militer pasca Mao semakin kuat dikalangan militer Cina. Hal tersebut didorong dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata RRC Yang Dezhi, menilai bahwa RRC sedang menghadapi musuh yang terlatih baik dan memiliki persenjataan yang sangat modern. Meskipun para perancang strategi militer Cina memerlukan perubahan-perubahan doktrin namun mereka tetap mempertahankan makna ideologis yang terkandung dalam doktrin perang rakyat Mao. Dengan formulasi demikian setidaknya mereka tidak perlu harus mengalami semacam pertarungan ideologis dengan para pengikut Mao dalam memperkenalkan doktrin baru. Dalam kerangka perang rakyat kondisi modern terdapat beberapa pergeseran konsepsional:

- a. Prinsip dasar yang mengutamakan keunggulan manusia atas peralatan tempur dianggap tidak sejalan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan perang modern. Dalam hal ini perang rakyat dalam kondisi modern (PRDKM) menekankan bahwa manusia dan persenjataan sama-sama penting dalam perang masa depan. Yang Shangkun mengatakan, bahwa faktor manusia tidak hanya mencakup kualitas-kualitas umum yang dimiliki manusia seperti keberanian, kesadaran dan semangat bekorban, tetapi juga harus mencakup kearifan, bakat, inteligensia, dan penguasaan kemampuan dalam mengoperasikan sistem persenjataan dan teknologi.
- b. Perang merupakan hal yang tidak terbatas (*the omnipotence of war*) dalam perang rakyat dianggap tidak tepat lagi. Prinsip ini diganti dengan prinsip bahwa perang dapat dicegah atau ditunda. Dalam hal ini fungsi perang rakyat lebih dimaksudkan sebagai penangkal (*deterrent*) terhadap negara yang termasuk menyerang Cina.
- c. Strategi berupa upaya untuk memancing musuh masuk bergeser menjadi strategi mencegah atau menunda musuh masuk. Strategi tersebut menurut

Wakil Menhan Cina tahun 1979 Xiao Ke, bahwa strategi tersebut tidak masuk akal lagi pada masa sekarang.

- d. Kesadaran akan pentingnya modernisasi pertahanan yang lebih menonjolkan konsep PRDKM. Menyadari bahwa kecanggihan peralatan tempur ikut menentukan kemenangan dalam perang. Oleh karena itu hal yang terpenting dari aspek modernisasi pertahanan adalah diterimanya pemikiran tentang perlunya bantuan luar negeri melalui ahli teknologi dari barat. Doktrin pertahanan Cina menekankan aspek pertahanan teritorial dalam kebijakan keamanan Cina dan tidak memberikan penekanan yang berlebihan terhadap strategi Angkatan Laut, yang tetap didasarkan pada pemikiran Mantan Panglima Angkatan Laut Xiao Jinguang. Formulasi Xiao ini merupakan dasar bagi strategi pertahanan pantai yang menjadi komponen kedua dalam strategi pertahanan Cina. Kedua strategi tersebut ialah doktrin pertahanan teritorial dan pertahanan pantai. Meskipun pada dewasa ini berdasarkan kepentingan nasional Cina telah dikembangkan doktrin pertahanan nasional yang bertumpu pada doktrin pertahanan aktif dan doktrin konstruksi kualitatif militer (Rizal Sukma, 1995:73-77). Ini berarti Cina senantiasa mengembangkan doktrin pertahanannya dihadapkan dengan kemampuan negara, kepentingan nasional, dan perkembangan geopolitik dan strategi kawasan regional dan internasional.

Sudah sepantasnya apabila doktrin pertahanan negara dilakukan kaji ulang dalam rangka mengembangkan kekuatan TNI, dihadapkan pada kemampuan ekonomi negara, kepentingan nasional (*national interest*) dan perkembangan lingkungan strategis. Kemana arah pembangunan postur TNI diprioritaskan, maka dari sana dimulai pengembangan doktrin angkatan, TNI, dan pertahanan negara. Di dalam lingkungan TNI AD kebijaksanaan penataan postur, dititikberatkan kepada peningkatan sumber daya manusia perlu mendapatkan prioritas dengan respon maksimal.

2.1.5.3 Strategi Kontemporer

Suatu definisi strategi kontemporer yang dipakai di Amerika adalah ilmu pengetahuan dan seni, menggunakan kekuatan militer suatu bangsa (satu koalisi) untuk memperkuat dan mengamankan kepentingan bangsa itu secara efektif terhadap musuh yang betul ada, musuh yang potensial, maupun musuh yang diperkirakan. Sedangkan pengertian yang berasal dari dunia militer Amerika berbunyi, strategi adalah seni dan ilmu tentang pengembangan serta penggunaan kekuatan politik, ekonomi, psikologi, dan militer yang diperlukan dalam damai dan perang, untuk dapat memberikan dukungan maksimal kepada kebijakan (*policy*) meningkatkan kemungkinan dan konsekuensi yang menguntungkan bagi tercapainya kemenangan serta mengurangi kemungkinan kekalahan (*Dictionary of US Military Terms for Joint Usage*). Sedangkan menurut *Webster's Third New International Dictionary* mengatakan strategi adalah ilmu dan seni tentang penggunaan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, psikologi, dan militer satu bangsa atau kelompok bangsa-bangsa yang memungkinkan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan, baik dimasa damai maupun perang (Saydiman Suryohadiprojo, 2005).

2.1.6 Struktur Organisasi Militer (*Military Organization*)

Menurut Beishline, definisi pengorganisasian militer (*military organizing*) adalah proses membuat prosedur-prosedur, faktor-faktor, dan struktur organisasi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian pada dasarnya adalah usaha untuk mendefinisikan perencanaan kedalam bagan organisasi sebagai bentuk mekanisme manajemen untuk menjalankan tugas dan melakukan pengontrolan guna meraih tujuan organisasi. Untuk melaksanakan tugas organisasi, tugas harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Setiap tugas atau aktivitas dalam organisasi yang kompleks memiliki fungsi yang berbeda. Dalam mencapai tujuan organisasi, fungsi harus dirumuskan secara tepat dan dibedakan berdasarkan bagian atau kelompok yang akan menjalankannya. Keahlian (spesialisasi) menjadi dasar siapa yang harus menjalankan fungsi tersebut. Peran tugas dan fungsi dalam organisasi militer telah banyak mengalami proses evolusi dan devolusi. Proses devolusi fungsi

adalah adanya perbedaan fungsi secara vertikal yang biasanya akan mendorong kebutuhan untuk adanya spesialisasi pekerjaan. Sedangkan proses evolusi fungsi adalah proses perbedaan fungsi secara horizontal dari fungsi lini yang umumnya semakin membutuhkan kemampuan manajerial yang spesifik.

Tujuan organisasi militer, kebijakan, otoritas, tanggungjawab dan pertanggungjawaban akan mempengaruhi bangun struktur organisasi. Struktur organisasi militer umumnya dikeluarkan oleh otoritas paling tinggi. Struktur organisasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu struktur lini (*the line or scalar structure*), organisasi lini dan staf (*the line and staff organization*), struktur fungsional (*the functional structure*) dan organisasi komite (*the comitte organization*) (Connie Rahakundini Bakrie, 2008:27). Organisasi dengan struktur lini banyak digunakan oleh organisasi militer, meskipun tidak ada organisasi militer modern yang menggunakan secara utuh. Struktur organisasi lini adalah yang paling tua dan sederhana, namun bila organisasi semakin berkembang besar dan semakin kompleks biasanya ditambah dengan unsur staf. Satuan administrasi pangkal TNI AD adalah merupakan satuan operasional tingkat angkatan darat yang menggunakan model struktur organisasi garis dan staf. Pada organisasi satuan administrasi pangkal (Satminkal) tingkat Kodim dan Batalyon, pembagian-pembagian tugas organisasi telah dikelompokkan dan dinyatakan dengan tegas tugas-tugas profesi perorangan yang harus dilakukannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian pengungkapan profesionalisme anggota/prajurit dalam organisasi mudah ditetapkan karena telah tersedia petunjuk dan aturan baku bagaimana seharusnya personel tersebut dilakukan pembinaan untuk mencapai profesionalisme keprajuritan.

2.2 Konteks Penelitian

Berdasarkan telaah kepustakaan yang telah dilakukan ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

- a. Hasil penelitian Connie Rahakundini Bakrie (2008), yang berjudul “Pertahanan negara dan postur TNI ideal”. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dalam mewujudkan postur TNI ideal yang tangguh,

kuat, berwibawa, dan profesional membutuhkan berbagai kebijakan sipil yang lengkap dan mendetail. Strategi pertahanan yang dilakukan dengan pendekatan *out side-inside we are dove* menuju *out side we are fox, inside we are dove*, berdasarkan kapasitas alutsista yang berbasis teknologi melalui formulasi postur TNI yang ideal, yang dirumuskan berdasarkan hitungan rata-rata dan trend analisis. Berdasarkan teknik *forecasting* dengan menggunakan metode *Mickey Firm*, *Blindman's*, dan *Tranquilizer*, kebutuhan anggaran pertahanan guna memenuhi pembangunan postur TNI ideal yang telah dirumuskan, dapat dilakukan melalui tiga tahap dengan meningkatkan anggaran gaji prajurit, anggaran operasional, dan anggaran pengadaan alutsista.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhadjir Effendy (2008), yang berjudul “Profesionalisme militer : Profesionalisme TNI”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi di tubuh TNI diharapkan mampu mewujudkan TNI yang profesional, efektif, efisien dan modern. Esensinya adalah meninggalkan peran sosial politik, memusatkan perhatian pada tugas pokok pertahanan negara, menyerahkan fungsi dan tanggungjawab keamanan dalam negeri kepada POLRI dan meningkatkan konsistensi implementasi doktrin gabungan, serta meningkatkan kinerja manajemen internal. Secara konseptual penelitian Muhadjir belum memberikan gambaran pencapaian sasaran profesionalisme, meskipun banyak dibahas tentang teori profesionalisme. Pembangunan profesionalisme TNI yang disampaikan dalam penelitiannya bersifat teori dan belum memberikan solusi bagaimana sesungguhnya profesionalisme TNI diwujudkan dan dapat diimplementasikan. Penelitian tentang profesionalisme TNI yang dikemukakan menghendaki profesionalisme TNI yang khas yaitu yang bercirikan *old professionalism* menurut Huntington dan *new professionalism* sesuai konsep baru dari Alfred Stepan.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh M.D. La Ode (2006), yang berjudul “Peran militer dalam ketahanan nasional : Studi kasus bidang Hankam di Indonesia

tahun 1967-2000". Penelitian ini menganalisa tentang peran militer dalam menciptakan ketahanan nasional dengan melakukan analisa deskriptif dan menggunakan metode kajian literatur. Militer memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan ketahanan nasional sejak era demokrasi terpimpin, orde baru, dan era reformasi. Dimasa depan penulis mengestimasi bahwa peran militer dalam peningkatan ketahanan nasional ditentukan oleh pandangan dan sikap enam komponen yaitu sikap militer, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, pandangan partai politik, LSM, dan media massa, yang lebih memilih militer sebagai alat negara dengan bobot sebesar 74,7%. Sedangkan militer sebagai alat kekuasaan sebesar 25,3%. Ini menunjukkan bahwa kajian analisis menurut M.D. La Ode bahwa peran militer dalam ketahanan nasional menunjukkan sikap konsisten.

Dari ketiga penelitian yang relevan di atas, secara teoritis memiliki hubungan atau relevansi dengan penelitian yang akan ditulis dan secara konseptual dapat dijadikan sebagai acuan teori umum bagi peneliti dalam melakukan penelitian, karena kajiannya sama-sama tentang aspek pembangunan postur TNI, sedangkan studi penelitian lebih memfokuskan pada aspek profesionalisme. Jadi yang berbeda hanyalah subyek yang diteliti, penelitian yang relevan mengkaji masalah profesionalisme dari sudut pandang strategi penganggaran dan status. Sementara penelitian ini mengkaji masalah profesionalisme dari aspek strategi untuk mengimplementasikannya. Jadi kajian teori penelitian yang relevan ini dapat dijadikan pedoman peneliti dalam memahami fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kualitatif yang berhubungan implementasi peran TNI AD dalam peningkatan pertahanan negara. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan maksud peneliti hendak mengetahui pengembangan strategi pembinaan profesionalisme di satuan operasional TNI AD khususnya satuan di jajaran Korem 022/PT.

3.2 Variabel dan Indikator Penelitian

3.2.1 Variabel Penelitian

Penelitian terdiri atas dua variabel, yaitu:

- a. Peran TNI AD dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara, sebagai variabel independen.
- b. Profesionalisme satuan operasional, sebagai variabel dependen.

3.2.2 Indikator Penelitian

Indikator penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah komponen yang ada dalam teori dan konsepsi profesionalisme militer yang dikemukakan oleh Huntington (2003:8), yaitu:

- a. **Keahlian**, terdiri atas indikator yaitu:
 - 1) Spesialisasi keahlian.
 - 2) Sumber kekuatan yang dimiliki organisasi (personel, peralatan dan persenjataan).
 - 3) Pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam hierarki yang sangat ketat.
 - 4) Kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan.
 - 5) Kompetensi (kemampuan) khusus.
 - 6) Kemampuan mengorganisasi.

- 7) Kemampuan memperlengkapi.
 - 8) Kemampuan melatih angkatan bersenjata.
 - 9) Merencanakan operasi.
 - 10) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasinya baik dalam pertempuran maupun di luar pertempuran.
- b. **Tanggungjawab**, terdiri atas indikator yaitu:
- 1) Pengetahuan mengenai manajemen kekerasan.
 - 2) Pemahaman akan tingkat campur tangan negara.
 - 3) Keyakinan terhadap suatu nilai kebenaran.
 - 4) Kecintaan terhadap pekerjaan dan keahlian yang ia kuasai.
 - 5) Penggunaan keahlian demi kepentingan masyarakat luas.
- c. **Rasa Kesejawatan**, terdiri atas indikator, yaitu:
- 1) Pendidikan dan keterampilan tertentu yang dimiliki.
 - 2) Hubungan non-profesional.
 - 3) Eksklusifitas terhadap orang awam.
 - 4) Profesi birokratis.
 - 5) Hierarki kepangkatan.
 - 6) Pencerminan pangkat yang disandang sebagai keberhasilan dan derajat keprofesionalan.
 - 7) Penentuan pangkat dan jabatan.
 - 8) Tingkat kerjasama, kohesivitas dan solidaritas antar anggota.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi sebagai kumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok unit analisis atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Oleh karena itu Populasi dalam penelitian ini satuan operasional Korem 022/PT. Sedangkan sampel penelitian sebagai bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi, maka sampel penelitian ini adalah para komandan, para perwira dan para pelaksana di satuan operasional Korem 022/PT.

3.4 Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan

Penelitian ini menghimpun data baik data primer maupun data sekunder. Data primer berupa standar profesi di lingkungan satuan operasional Korem 022/PT dan pelaksanaan program pembinaan profesionalisme di lingkungan satuan tersebut, sedangkan data sekunder adalah teori-teori dan konsepsi para ahli tentang peran TNI AD dalam peningkatan kemampuan pertahanan negara, dan profesionalisme militer. Data primer penelitian diperoleh penulis dengan mempergunakan studi lapangan (*field reseacrh*) dengan mempergunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempergunakan studi kepustakaan dengan kategori data penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data penelitian adalah teknik yang dipergunakan menurut Milles dan Huberman, dan teknik analisis SWOT (Freddy Rangkuti, 2001:171). Analisis data penelitian akan dilakukan secara kualitatif, dan untuk itu penulis akan melakukan langkah-langkah sebagaimana dianjurkan oleh Milles dan Huberman (1992), yaitu: (1) menyusun satuan-satuan data yang terkumpul dari hasil wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Dalam proses ini dilakukan reduksi data, yaitu mengeliminasi data yang dianggap kurang atau tidak relevan, menyusun abstraksi dan menyusun satuan-satuan data; (2) kategorisasi, abstraksi data terus disempurnakan dan dikelompokkan sesuai dengan kategorinya; (3) menyusun hubungan antar kategori yang selanjutnya dicari pemaknaan dari hubungan setiap kategori, (4) interpretasi dan kesimpulan, hasil hubungan antar kategori selanjutnya ditemukan maknanya sebagai kesimpulan dengan logika induktif. Sementara itu teknik analisis SWOT dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program pembinaan profesionalisme sebagai analisis terhadap lingkungan internal, dan juga kajian terhadap peluang dan ancaman yang ada pada lingkungan eksternal dari satuan operasional Korem 022/PT.

BAB 4

PERAN TNI AD DALAM PERTAHANAN NEGARA DAN PEMBINAAN PROFESIONALISME

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 dan bab 3 tentang landasan teori dan metode penelitian, selanjutnya pada bab 4 ini merupakan bagian utama dari penyajian dan analisis hasil penelitian. Data yang diperoleh subyek peneliti (pada lampiran 2), selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan memilah dan memilah hasil kuesioner yang digali dari seluruh responden, serta sumber sekunder dari referensi. Pengolahan data dan informasi yang telah terpilih, selanjutnya disusun menjadi tema-tema dan sub tema, sehingga memungkinkan hasil penelitian tersajikan dengan kaidah logika penelitian analisis deskriptif. Atas dasar kerangka kerja tersebut, maka penyajian hasil penelitian ini disusun kedalam tujuh tema yaitu:

- a. Sistem pertahanan negara.
- b. Peran TNI AD.
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi peran TNI AD.
- d. Profesionalisme militer.
- e. Pembinaan profesionalisme dan revitalisasi lembaga pendidikan TNI AD.
- f. Gelar kekuatan Korem sebagai sub kompartemen strategis.
- g. Profesionalisme satuan operasional jajaran Korem 022/PT.

Dari tujuh tema tersebut di atas dielaborasi dan dieksplorasi, selanjutnya disusun kedalam tiga sub bahasan yang menggambarkan sejauhmana peran TNI AD dalam pertahanan negara, pentingnya profesionalisme militer, dan implementasi pelaksanaan program pembinaan profesionalisme satuan operasional jajaran Korem 022/PT. Melalui pembahasan tersebut akan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme TNI AD.

4.1 Peran TNI AD Dalam Pertahanan Negara

4.1.1. Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara merupakan salah satu unsur sistem keamanan nasional, dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi serangan militer negara lain.

Dewasa ini dilihat dari sudut pandang hukum memang tidak ada perang, tetapi dalam kenyataannya ada juga bukan kondisi damai, karena menguatnya permusuhan antar negara dan ketegangan yang memuncak (*neither war nor peace*). Pada kondisi lainnya, globalisasi dan kemajuan teknologi juga telah merubah bentuk ancaman, sehingga perkembangan perang juga telah bergeser dari bentuk perang tradisional menuju perang non tradisional. Persiapan pertahanan negara yang baik sangat dipengaruhi oleh efektifnya sistem keamanan nasional dan sistem kesejahteraan nasional. Bila situasi keamanan kurang baik dan kesejahteraan rendah, akan sulit menyiapkan pertahanan negara yang handal. Pertahanan negara adalah unsur yang sangat menentukan kehandalan sistem keamanan nasional Indonesia, sebab pertahanan negara harus menjamin kedaulatan dan eksistensi negara. Ini berarti kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia sangat bergantung pada kehandalan pertahanan negara yang dibangun. Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan pertahanan negara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belum komprehensifnya kebijakan dan strategi pertahanan. Selama ini kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial. Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan darat, laut, dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa dokumen *Strategic Defense Review* (SDR), strategi pertahanan raya, dan postur pertahanan sebagai dasar pembangunan kekuatan pertahanan negara.
- b. Belum mantapnya partisipasi masyarakat (*civil society*) dalam pembangunan pertahanan. Kemampuan pertahanan negara yang kuat tersebut sangat

bergantung kepada kemampuan kekuatan inti pertahanan yaitu TNI dan kemampuan komponen cadangan pertahanan. Dalam era konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, penyusunan perencanaan kebijakan dan strategi pertahanan dalam kerangka peningkatan kemampuan pertahanan negara adalah tanggungjawab seluruh komponen bangsa dan membutuhkan peranan masyarakat (*civil society*). Dimasa datang, seiring dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dibutuhkan peningkatan kapasitas *civil society* untuk dapat menjalankan peran aktif sebagai bagian komponen bangsa yang turut memikul tanggungjawab peningkatan kemampuan pertahanan secara keseluruhan.

- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana, peningkatan profesionalisme serta rendahnya kesejahteraan anggota TNI. Permasalahan mendasar dalam meningkatkan profesionalisme anggota TNI dimasa mendatang adalah fasilitas pendidikan yang kurang memadai, dan fasilitas latihan, serta medan latihan yang terbatas. Selain itu potensi dukungan pertahanan seperti penyusunan komponen cadangan dan pendukung merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kemampuan pertahanan selama 5 tahun mendatang.
- d. Rendahnya kondisi dan jumlah Alutsista. Masalah terbesar yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan adalah jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Alutsista TNI AD masih jauh dari kondisi mencukupi. Saat ini kemampuan pertahanan TNI AD antara lain bertumpu pada kendaraan tempur (Ranpur) berbagai jenis dengan kondisi siap hanya sekitar 60 persen dan pesawat terbang dengan kondisi siap hanya sekitar 50 persen. Kebutuhan alat komunikasi yang merupakan pendukung utama kemampuan pertahanan TNI AD juga belum dapat terpenuhi dan masih mempergunakan teknologi yang rawan penyadapan.

- e. Embargo senjata oleh negara produsen utama serta rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional. Selama ini upaya modernisasi peralatan pertahanan secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. Ketidaksesuaian di antara kebutuhan peralatan pertahanan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain merupakan salah satu penyebab ketertinggalan peralatan pertahanan dan ketergantungan terhadap negara lain.
- f. Belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal. Menurunnya kemampuan pertahanan selama ini disebabkan terutama oleh anggaran yang tersedia. Meskipun telah meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, anggaran pertahanan yang dapat disediakan baru 74,1 persen dari kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Sedangkan, kebutuhan minimal anggaran pertahanan tersebut dirancang untuk mengganti penyusutan alutsista TNI dan menutup kesenjangan antara kondisi nyata TNI saat ini dengan kebutuhan minimal personel dan peralatan TNI seperti yang tercantum dalam TOP (Tabel Organisasi dan Personel) dan DSPP (Daftar Susunan Personel dan Peralatan).
- g. Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Masyarakat adalah komponen penting dalam suatu sistem pertahanan negara. Manfaat dari bela negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan negara semata, akan tetapi lebih jauh dari itu perubahan sikap mental dan sosial masyarakat memiliki pengaruh luas bagi kemajuan suatu bangsa.

4.1.2 Peran TNI AD

Secara teoritis, penyesuaian paradigma dalam rangka aktualisasi peran yang sesuai dengan kondisi pada saat ini merupakan suatu dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban, dimana menurut Astrid S. Susanto (1985:77) dikenal dengan istilah peran yang diharapkan (*role expectation*). Ekspektasi

peran tersebut dikonkritkan dengan adanya tugas-tugas dan pola perikelakuan dari pelaksana peran yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1980:27). Mengacu kepada pendapat bahwa peran merupakan pola perikelakuan, maka perwujudan peran TNI AD di bidang pertahanan negara tentunya tidak terlepas dari peranan ideal, peranan yang dipersepsikan, dan peranan yang dilaksanakan dalam sistem pertahanan negara yang dianut pada masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

a. **Peran ideal.** Peran ideal TNI AD dapat diketahui dari perumusan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan status TNI AD sebagai alat pertahanan negara yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peran ideal TNI AD merupakan penjabaran tugas pokok yang diamanatkan oleh undang-undang. Pencapaian peran ideal TNI AD akan menentukan tingkat kemampuan sistem pertahanan negara. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran ideal TNI AD dapat dikemukakan, yaitu:

- 1) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- 2) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 3) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa: (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk: (a) mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; (b) melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; (c) melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan (d) ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

- 4) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa Angkatan Darat bertugas: (1) melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; (2) melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; (3) melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta (4) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, sedangkan yang dimaksud pemberdayaan wilayah pertahanan dalam penjelasan atas undang-undang adalah: (a) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (b) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka peranan ideal TNI AD terdiri atas:

- 1) Sebagai bagian dari TNI adalah merupakan kekuatan utama yang melaksanakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

- 2) Sebagai bagian dari TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 3) Sebagai bagian dari TNI merupakan pelaksana kebijakan pertahanan negara untuk: (1) mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; (2) melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; (3) melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan (4) ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
- 4) Sebagai pelaksana tugas TNI matra darat di bidang: (1) pertahanan; (2) menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; (3) pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta (4) pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yang peranannya adalah: (a) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (b) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (c) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

b. Peran yang dipersepsikan. Persepsi mengenai peran TNI AD dalam masyarakat bangsa negara Republik Indonesia didasarkan pada hubungan sipil militer. Menurut Muhadjir Effendy (2008:255) pemahaman mengenai hubungan sipil-militer didasarkan pada pandangan bahwa konsep hubungan sipil dan militer cenderung melihat dari konsep hubungan sipil-militer Amerika yang memisahkan peran sipil dan peran militer, dimana militer berada dalam pengawasan sipil. Di negara yang menganut sistem demokrasi liberal menurut pandangan Samuel Huntington konsep hubungan sipil-militer adalah supremasi sipil atas militer, yang lazim disebut dengan kontrol sipil obyektif (*objective civilian control*). Pasca reformasi Indonesia

juga mengembangkan sistem demokrasi dengan mengedepankan konsep supremasi sipil dalam rangka hubungan sipil-militer. Menurut Thomas C. Bruneau dan Scott D. Tollefson (2006:24) dalam negara berkembang yang sedang berdemokrasi berlaku mekanisme kontrol sipil tradisional. Dalam demokrasi, kegiatan militer dan misi yang ditetapkan, dikendalikan dan dibatasi oleh otoritas politik melalui mekanisme seperti konstitusi, undang-undang, kebijakan, dan peraturan. Kontrol atas militer di masa damai dan perang memerlukan berbagai teknik kelembagaan dan praktek, yang masing-masing akan membawa keuntungan dan kerugian tertentu. Tujuh hal yang paling penting dan efektif bagi politisi sipil untuk menahan kekuatan militer yang profesional perlu untuk dipahami secara rinci. Kontrol tersebut masing-masing dapat menghasilkan pembatasan dan perlawanan yang terbaik atau menjadi dilema terburuk.

- 1) **Pembatasan pada tugas (*limits on the mission*).** Politisi akan berusaha untuk membatasi misi militer sebagai alat untuk memastikan bahwa militer menahan diri dari kegiatan yang mungkin membawanya ke dalam konflik dengan otoritas sipil. Mereduksi peran Angkatan Bersenjata dari implementasi doktrin militer. Pembatasan misi juga dapat untuk mencegah militer menjadi tidak terlalu terlibat dalam urusan-urusan politik dan sosial dalam negeri. Namun demikian, kebijakan tersebut memiliki kelemahan yang serius. Angkatan Bersenjata yang berkonsentrasi pada sebagian besar tugas non tempur, dan tugas keamanan internal, menjadi tidak akan kompeten pada tugas perang. Mereka akan memiliki terlalu banyak operasi domestik yang berkelanjutan, sementara itu tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang pada umumnya bukan menjadi domain militer semata.

- 2) **Pembatasan pada ukuran/postur (*limits on the size*).** Cara lain untuk mengendalikan militer adalah untuk membatasi ukurannya. Kelebihan metode ini jelas menjadikan kemampuan prajurit menjadi lemah, serta kekuatan militer menjadi riskan. Hal ini berarti akan menimbulkan bahaya internal yaitu keselamatan bangsa dan negara.

Namun kebijakan seperti ini memungkinkan negara untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya untuk kebutuhan lain. Kerugiannya sudah jelas Angkatan Bersenjata akan tergantung dari kebijakan sipil dalam mempertimbangkan misi militer dan mencapai ukuran tertentu untuk mengatasi masa kritis. Dengan pengendalian pembatasan ukuran militer merupakan kunci untuk membatasi pengembangan kemampuan pertahanan. Selain itu kekuatan militer yang kecil tidak akan mendapatkan bentuk pengembangan kekuatan pertahanan yang mampu menghadapi ancaman di masa datang. Sebagai contoh kasus adalah sengketa Indonesia-Malaysia atas P. Sipadan dan P. Ligitan serta blok Ambalat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pembangunan kekuatan pertahanan kita sehingga tidak memberikan efek penangkalan terhadap negara lain.

- 3) **Pembatasan anggaran (*limits on the budget*).** Suatu pemerintahan dapat melaksanakan kekuasaan dengan membatasi anggaran pertahanan dan mendikte cara-cara yang disesuaikan terhadap penggunaan anggaran militer. Sebuah sistem kontrol yang ketat terhadap pengeluaran anggaran pertahanan, memiliki keuntungan untuk mempertahankan militer dibawah pengamatan langsung. Prospek pengeluaran anggaran pertahanan yang lebih tinggi sesungguhnya dapat digunakan sebagai pengganti untuk mengendalikan perilaku militer yang baik. Hal tersebut sama pentingnya dalam proses pelaksanaan penganggaran pertahanan dimana parlemen harus mampu menjaga komunikasi rutin dengan staf umum militer. Sayangnya kita tidak banyak memiliki kader sipil ahli bidang pertahanan dalam legislatif, atau Kementerian Pertahanan yang memiliki kapabilitas dan *bargaining power* dalam hal perumusan rencana anggaran pertahanan yang ideal. Ketidaktahuan dan ketidakpaduan antara pemerintah dan legislatif dalam anggaran pertahanan dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap pengawasan

dan kontrol sipil, sehingga menimbulkan polarisasi dan politisasi hubungan sipil-militer.

- 4) **Pembatasan konstitusional dan hukum (*constitutional and legal limitations*).** Instrumen konstitusional dan berbagai aturan hukum dalam demokrasi dapat membatasi kekuatan militer. Meskipun tidak ada keuntungan dan kerugian yang melekat atau sistematis bagi tentara dari mekanisme tersebut. Model dan karakteristik yang berbeda-beda hanya mencerminkan fundamental masyarakat demokratis itu. Di Amerika Serikat, Angkatan Bersenjata dikendalikan melalui pemisahan kekuasaan konstitusional dalam pemerintahan federal. Pengawasan militer dibagi antara Presiden sebagai panglima tertinggi dan kongres untuk menetapkan anggaran serta menyetujui promosi pejabat. Dalam sistem pemerintahan di Benua Eropa, setiap kabinet pemerintahan mengontrol atas militer secara terpusat. Tidak ada sistem kontrol hukum atas militer, meskipun hal itu sangat mudah dilakukan. Di Amerika Serikat, Departemen Pertahanan dan militer (seperti staf gabungan) bergantung kepada kongres lepas terhadap presiden untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau mereka naik banding langsung ke pendukung pemilih di Amerika Serikat.
- 5) **Budaya profesionalisme (*culture of professionalism*).** Sistem kontrol yang selanjutnya adalah profesionalisme militer yang merupakan budaya militer itu sendiri. Samuel Huntington, dalam *Prajurit dan Negara*, berpendapat bahwa profesionalisme militer akan bertindak untuk membatasi tentara dari melanggar norma-norma demokrasi. Jika dalam demokrasi pelayanan militer memiliki rasa yang kuat dari misi dan etika, militer akan mengembangkan sebuah budaya organisasi yang didasarkan pada pengendalian diri dan menghormati otoritas sipil dan hukum. Keuntungan ini terutama terletak pada kontrol internal dengan menempatkan tanggungjawab

untuk menahan diri secara langsung pada petugas. Di beberapa negara demokrasi muda, khususnya mereka yang memiliki sejarah panjang terhadap korupsi, konflik politik dan masyarakat sipil yang lemah, mungkin lebih mudah untuk menanamkan disiplin dalam militer daripada tergantung pada politisi untuk berperilaku merespon. Tantangan sesungguhnya di sebagian besar negara demokrasi baru adalah justru bagaimana mendirikan lembaga, termasuk militer sebagai profesi, yang akan menyebabkan tegaknya budaya demokrasi dengan mengedepankan supremasi sipil, yang dibangun melalui hubungan sipil-militer dengan mengembangkan kontrol sipil obyektif. TNI yang profesional seperti yang ditetapkan didalam undang-undang bukan sebatas aturan hukum, namun hal yang terpenting adalah bagaimana sesungguhnya kebijakan negara mendorong agar TNI dapat mengimplementasikannya.

- 6) **Norma masyarakat (*societal norms*).** Demokrasi harus mengakui legitimasi militer sebagai alat kenegaraan yang penting. Kewibawaan militer pada gilirannya terletak pada persetujuan atau pengakuan masyarakat umum. Tentara profesional dalam demokrasi harus ditingkatkan untuk mencerminkan komposisi sosial, etnik, dan geografis masyarakat. Idealnya, demokrasi akan mengembangkan kebijakan yang mendorong warga negara dari semua latar belakang untuk mempertimbangkan keikutsertaan bela negara dalam jangka waktu tertentu atau membuat karir di militer. Pemerintah harus memiliki *political will* dalam rangka pembangunan kemampuan pertahanan negara dengan menetapkan regulasi yang berkaitan dengan kekuatan pengganda. Untuk mendorong kebijakan inklusif seperti itu, militer harus menanamkan dalam anggotanya nilai-nilai masyarakat yang lebih luas.
- 7) **Kebebasan pers (*a free press*).** Kebebasan pers dalam masyarakat demokratis adalah alat penting yang digunakan warga dan perwakilan

mereka untuk tetap menggenggam kendali kekuasaan militer. Akses jurnalis kepada militer dan kegiatan-kegiatannya memungkinkan pengawasan publik, mendorong debat publik atas reformasi, dan memastikan bahwa pihak militer bertanggungjawab kepada masyarakat luas daripada beberapa elitis. Akibatnya tekanan idealisme tersebut dapat memainkan peran penting dalam menahan kekuatan militer untuk dapat bersikap dan bertindak institusional sesuai dengan nilai-nilai utama.

c. Peran yang dilaksanakan. Hubungan sipil-militer mempunyai dampak terhadap misi atau peran yang ditugaskan kepada militer. Peran yang dilaksanakan oleh TNI AD sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan hubungan sipil-militer di Indonesia. Apabila kontrol sipil obyektif dalam negara demokrasi dijalankan, maka akan berkembang suasana (Lary Diamond & Marce F. Platner, 2000:4) sebagai berikut:

- 1) Profesionalisme militer yang tinggi dan pengakuan dari pejabat militer akan batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka.
- 2) Subordinasi yang efektif dari militer kepada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan militer dan luar negeri.
- 3) Pengakuan dan persetujuan dari militer kepada pemimpin politik atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer.
- 4) Minimalisasi intervensi militer dalam politik tidak dengan intervensi politik dalam militer.

Misi dan peran merupakan tugas utama TNI AD yang dijabarkan dari analisa ancaman, meliputi sifat ancaman (militer/non militer) dan sumber ancaman (internal/eksternal). Cara terbaik untuk mengidentifikasi misi dan peran TNI AD adalah dengan memeriksa doktrin, yang dapat dipahami sebagai *software* untuk menjalankan *hardware* militer. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 8 sebagai dasar hukum, tugas Angkatan Darat dijabarkan dalam Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (Dispenad, 2008) bahwa Angkatan Darat sebagai bagian dari TNI

berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara berperan sebagai:

- 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas.
- 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara di darat yang terganggu akibat kekacauan keamanan

Peranan yang dilaksanakan TNI AD tersebut di atas melahirkan visi dan misi TNI AD. Visi TNI AD adalah solid, profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan jajaran TNI Angkatan Darat yang profesional dan modern dalam penyelenggaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat.
- 2) Meningkatkan dan memperkokoh jatidiri prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 3) Mewujudkan kualitas prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya.
- 4) Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. Mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. baik dalam rangka *Confidence Building Measure* (CBM) maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit.

- 5) Mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI Angkatan Darat dalam upaya pertahanan negara.

4.1.3 Permasalahan Implementasi Peran TNI AD Dalam Pertahanan Negara

Dalam rangka mengimplementasikan peran TNI AD guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara, TNI AD telah menyusun strategi penataan dalam rancangan postur TNI AD tahun 2005-2024. Dalam rancangan postur TNI AD tahun 2005-2024, pelaksanaan pembangunan kekuatan TNI AD dibagi dalam empat tahap strategi dengan melakukan pembinaan, penyiapan melalui pendidikan dan latihan, serta gelar secara proporsional untuk menciptakan daya tangkal aspek darat yang tangguh dalam sistem pertahanan negara. Menurut Hotma Marbun (2009:8) dalam tulisannya menata postur TNI AD, dijelaskan bahwa penataan postur TNI AD belum mampu diwujudkan secara optimal, karena berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. **Belum adanya kesamaan persepsi terhadap ancaman.** Masih ada sebagian dari komponen bangsa yang menganggap bahwa Indonesia tidak akan menghadapi ancaman agresi atau invasi negara asing selama kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang. Mengingat hakekat ancaman sesungguhnya bukan hanya agresi atau invasi negara asing saja, akan tetapi dalam kondisi global dewasa ini ancaman akan lebih berkembang, bervariasi dalam bentuk ancaman non tradisional dan bersifat asimetri. Bentuk ancaman non tradisional tersebut merupakan ancaman yang sangat serius yang dapat mempengaruhi dan mengancam eksistensi dan kedaulatan negara. Beberapa kasus yang menjadi perhatian dunia seperti percobaan peluncuran roket bertenaga nuklir oleh Korea utara, dan tenggelamnya kapal perang Korea Selatan, penyanderaan kapal kemanusiaan di perairan jalur Gaza, aksi terorisme, bencana alam yang terjadi di berbagai negara, krisis politik di Thailand perlu disikapi oleh pemerintah dan diantisipasi oleh TNI AD, karena tidak tertutup kemungkinan kekuatan TNI AD dapat dilibatkan atas permintaan PBB atau negara yang sedang mengalami konflik. Pada sektor keamanan nasional, masalah Aceh, Papua, Maluku dan wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga serta ancaman terorisme

merupakan suatu ancaman dalam negeri yang memerlukan kesiapan militer untuk diantisipasi.

- b. **Belum adanya keseimbangan gelar kekuatan.** Satuan TNI AD disusun dalam organisasi satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan satuan bantuan administrasi yang digelar menjadi kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan, dan badan pelaksana pusat. Secara gelar disadari belum memenuhi unsur keseimbangan antar jenis satuan. Khususnya pada gelar kekuatan kewilayahan masih terdapat Kotama yang belum dilengkapi dengan satuan bantuan tempur atau satuan bantuan administrasi setingkat batalyon. Kondisi yang demikian akan mempengaruhi terciptanya daya tangkal. Karena itulah dibutuhkan keseimbangan demi terciptanya kecepatan efektivitas dan efisiensi dalam pengerahan kekuatan bila diperlukan sewaktu-waktu.
- c. **Belum memenuhi ketentuan standar umum (KSU) materiil TNI AD.** Organisasi militer ditetapkan melalui TOP/DSPP, dimana pada organisasi tersebut distandarisasikan jenis materiil yang digunakan dalam organisasi. Hal tersebut diperlukan agar memudahkan dalam pembinaan maupun dalam penggunaan kekuatannya. Dengan standarisasi alutsista yang dipergunakan oleh suatu satuan akan memudahkan mengukur kemampuan dan batas kemampuan satuan jajaran TNI AD. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam penentuan dan pemilihan satuan dan pembagian tanggungjawab yang jelas dan proporsional dalam melaksanakan tugas. Pada saat ini satuan Angkatan Darat masih menggunakan berbagai macam jenis dan type materiil/bekal yang digunakan oleh satuan jajaran TNI AD. Kedepan perlu ditata terutama dalam pengadaan materiil yang distandarisasikan.
- d. **Minimnya dukungan anggaran pertahanan.** Dukungan anggaran pertahanan yang dialokasikan kepada TNI dirasakan belum memadai untuk membangun kekuatan pertahanan, meskipun dalam bentuk *minimum*

essential forces. Selama sepuluh tahun terakhir anggaran belanja pertahanan RI masih berada dibawah 1% dari PDB. Besaran anggaran tersebut masih berada dibawah anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berada di atas 2% PDBnya. Anggaran pertahanan pada tahun 2009 sebesar Rp. 33,6 triliun sedangkan tahun 2010 Rp. 33,8 triliun hanya mampu mendukung 36% kebutuhan minimal. Hal tersebut sangat berdampak pada tingkat operasional TNI AD baik dalam pembangunan sumber daya manusia, maupun alat utama sistem senjata.

4.2 Mengapa Pembinaan Profesionalisme Penting?

Dalam perspektif pertahanan negara, profesionalisme militer merupakan alat untuk mewujudkan kemampuan dan kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. Bagi TNI AD pengembangan dan pembangunan kemampuan profesionalisme militer adalah amanat yang menjadi perhatian sebagai wujud dari pelaksanaan undang-undang. Pembangunan profesionalisme militer wajib dapat mempengaruhi pola pikir prajurit, bahwa sebagai alat negara yang mempunyai tugas pokok di bidang pertahanan negara, harus memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan profesi militer dengan manajemen kekerasan. Didalam organisasi militer terdapat berbagai sumber kekuatan kekerasan baik berupa personel, peralatan dan persenjataan. Juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam hierarki yang sangat ketat disamping berdasar jenis kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan. Hal tersebut menjadikan pekerjaan militer sangat unik. Pengelolanya pun memerlukan kemampuan yang sangat khusus. Namun demikian pembangunan profesionalisme militer di Indonesia harus tetap berorientasi pada jatidirinya yaitu prajurit rakyat. Oleh karena itu tuntutan profesionalisme militer tidak identik dengan kembali ke barak. Pembinaan profesionalisme pada era reformasi dan demokratisasi harus berorientasi pada tugas-tugas TNI/TNI AD baik untuk menghadapi perang (OMP) dan dimasa damai (OMSP) dalam mengisi kemerdekaan. Untuk itu memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas departemen. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka pengembangan strategi pembinaan profesionalisme dalam rangka implementasi peran TNI AD di bidang

pertahanan negara akan dapat tercapai bila dengan memahami batasan peranan TNI AD; tingkat profesionalisme yang mendukung peranan tersebut; dan pembinaan yang telah dilakukan pada tingkat kesatuan operasional yang ada di lingkungan TNI AD.

4.2.1 Profesionalisme Militer

Konsep pertahanan negara adalah pertahanan kewilayahan, dimana kemampuan pertahanan wilayah yang dikembangkan adalah yang bertumpu pada pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil atau biasa dikenal dengan *Land Base Oriented*, hal tersebut mensyaratkan adanya kemampuan prajurit yang profesional dan handal serta didukung alutsista yang memadai. Menyadari hal tersebut maka profesionalisme menjadi tuntutan dalam pelaksanaan tugas. Menyikapi hal ini maka TNI AD sebagai komponen utama pertahanan di darat harus berpikir dan bertindak realistis sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan serta dukungan anggaran yang tersedia dari negara. Meskipun kemampuan dukungan anggaran TNI mengalami kenaikan sebesar Rp. 10 triliun pada APBN 2010 (Berita Sore, 2009), namun dukungan tersebut lebih diarahkan kepada lima hal yaitu dukungan operasional nyata, kesiapan dan kesiapsiagaan operasional, pemeliharaan alutsista, pendidikan dan latihan, serta kesejahteraan prajurit. Penekanan tersebut di atas terlihat bahwa pemenuhan dan pembelian alutsista baru bukan menjadi prioritas utama TNI untuk memodernisasi alutsistanya dalam rangka menciptakan daya tangkal yang tangguh. Dihadapkan dengan realita tersebut, kebijakan TNI AD yaitu membangun kemampuan organisasi melalui peningkatan sumber daya manusia, yang pada dasarnya organisasi satuan TNI AD berbasis pada kekuatan prajurit yang dilengkapi dengan sistem persenjataan. Upaya yang ditempuh adalah mempersiapkan, memelihara dan meningkatkan SDMnya agar mampu menjalankan setiap tugas yang diberikan, dalam arti kata membentuk prajurit yang profesional.

Penjelasan tentang beberapa teori profesionalisme oleh para ahli yang telah diuraikan pada Bab 2 dapat ditarik suatu pendapat bahwa profesionalisme militer adalah militer yang mempunyai pengetahuan, pendidikan, kemampuan,

keterampilan serta tanggungjawab di bidang pertahanan dan keamanan negara dari berbagai kemungkinan ancaman. Terlihat bahwa pengertian profesionalisme secara konvensional menurut pandangan negara Barat dengan TNI terdapat perbedaan sudut pandang, profesionalisme ala Barat menempatkan korps Perwira sebagai suatu badan profesional yang menjadi dasar pembentukan profesionalisme militer. Sedangkan para prajurit golongan Bintara dan Tamtama disebut sebagai kelompok vokasional. Profesionalisme Barat terdiri dari profesionalisme personel dan profesionalisme korps militer. Hubungan antara profesionalisme personel dan profesionalisme korps militer bersifat koheren dan saling mempengaruhi. Sedangkan profesionalisme TNI sebagai produk undang-undang adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Dengan demikian jelas bahwa profesionalisme TNI merupakan sikap dan kehendak negara/pemerintah terhadap institusi TNI, untuk melakukan perubahan peran secara profesional. Berdasarkan konsep pengertian profesionalisme TNI dan secara konvensional, maka dalam mewujudkan profesionalisme TNI AD perlu diarahkan kepada dua hal yaitu profesionalisme keprajuritan dan profesionalisme institusional. Hal tersebut berorientasi kepada amanat undang-undang bahwa profesionalisme ditujukan kepada tentara yang bermuara kepada kemampuan penyelesaian tugas organisasi.

Profesionalisme keprajuritan lebih diarahkan kepada pembentukan keahlian, tanggungjawab, kecintaan kepada pekerjaan, disiplin yang tinggi dan kesetiaan kepada satuan serta mematuhi ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan profesionalisme institusional diarahkan kepada pembentukan satuan yang solid dilengkapi dengan kebutuhan piranti lunak dan alutsista, penetapan tugas, peran dan fungsi yang implementatif ditunjang oleh dukungan publik dan otoritas sipil, serta legalitas yang jelas agar pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

4.2.2 Pembinaan Profesionalisme dan Revitalisasi Lembaga Pendidikan TNI AD

- a. **Implementasi pembinaan profesionalisme.** Pada prinsipnya pembinaan profesionalisme di lingkungan TNI AD didasarkan pada optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas TNI AD di bidang pertahanan negara matra darat. Sebagai landasan pembinaan profesionalisme TNI AD adalah doktrin pembinaan TNI AD. Orientasi dalam sistem pembinaan TNI AD diarahkan kepada sasaran terbentuknya organisasi TNI AD yang kuat, solid dan profesional. Dalam situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini oleh TNI, maka pilihan prioritas pembinaan TNI AD adalah pembinaan sumber daya manusia. Dengan demikian pembinaan sumber daya manusia merupakan titik sentral dalam pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AD yang diharapkan dapat menentukan keberhasilan TNI AD melaksanakan tugas pokok. Implementasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah menata organisasi TNI AD dengan melaksanakan pembenahan dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk dapat menciptakan personel yang unggul dan profesional. Penataan organisasi tidak diarahkan pada penambahan personel. Pembentukan organisasi baru atau pengembangan organisasi tidak berimplikasi terhadap penambahan personel untuk memperbesar kekuatan, tetapi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi. Penataan organisasi pada tingkat Komando Utama dan satuan-satuan operasional jajarannya diarahkan untuk merampingkan organisasi sehingga menjadi efisien dan berbasis kinerja. Dengan program penataan organisasi tersebut, TNI AD juga melakukan langkah pembenahan terhadap sistem pembinaan personel terutama yang menyangkut tentang *recruitment* prajurit, pola karier dan TOA/TOD guna memperoleh perimbangan kekuatan antar Kotama dalam rangka gelar kekuatan personel. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya prajurit juga dilakukan pembenahan sistem pendidikan dan kurikulum, serta perangkat pengendali pendidikan untuk menghasilkan kualitas personel yang memiliki ethos kerja, mahir dan handal. Disamping itu pembinaan program latihan dalam rangka

memelihara keterampilan dan kemampuan prajurit dan satuan dimulai dari tingkat perorangan, kelompok, dan satuan terus digalakkan.

- b. **Revitalisasi pendidikan militer.** Pendidikan adalah fungsi utama organisasi militer. Sebagai ilustrasi bahwa istilah doktrin militer digunakan sebagai dasar untuk merujuk pada prinsip-prinsip yang memandu pasukan militer dalam aksi, berasal dari makna sesuatu yang diajarkan. Pendidikan militer profesional juga menekankan hubungan mendasar antara pendidikan dan militer sebagai profesi. Memang, pembentukan pendidikan militer formal telah diakui sebagai profesi. Sebab kata pendidikan menyiratkan perolehan pengetahuan umum dan keterampilan yang dibutuhkan untuk efektivitas, sebagai lawan dari pelatihan, yang berarti persiapan untuk melakukan fungsi tertentu, tugas, atau misi. Pendidikan yang diterapkan pada militer juga bermakna indoktrinasi, yaitu membentuk nilai dan perilaku, termasuk yang diperlukan untuk kohesi unit, moral, dan secara signifikan menanamkan kesetiaan kepada negara. Pendidikan militer profesional memiliki peran untuk memainkan hubungan sipil-militer dalam suatu negara. Pendidikan militer profesional mempunyai arti penting yaitu menyiapkan prajurit dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Dengan pendidikan militer profesional akan dihasilkan sasaran pembentukan profesionalisme TNI AD yaitu profesionalisme keprajuritan dan profesionalisme institusional, hal tersebut disebabkan sebagai berikut:
- 1) Organisasi TNI AD memiliki area tertentu berdasarkan kompetensi pengetahuan para ahli.
 - 2) Ada sistem melanjutkan pendidikan yang dirancang untuk mempertahankan kompetensi profesional.
 - 3) Anggota memiliki kewajiban kepada masyarakat dan harus memenuhinya tanpa mempedulikan pemberian upah (remunerasi).
 - 4) Sebuah sistem nilai dalam organisasi melanggengkan karakter profesional dan memupuk hubungan dengan masyarakat.

- 5) Organisasi memiliki kontrol atas sistem hadiah dan hukuman serta berada dalam posisi untuk menentukan kualitas mereka memasuki profesi.

4.3 Pelaksanaan Program Pembinaan Profesionalisme Satuan Operasional Jajaran Korem 022/PT

4.3.1 Gelar Kekuatan Korem Sebagai Sub Kompartemen Strategis

Komando Resort Militer 022/Pantai Timur disingkat Korem 022/PT secara struktural berada di bawah Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan adalah gelar satuan Komando Kewilayahan merupakan sub kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayah Korem 022/Pantai Timur guna menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk mencapai tugas pokok tersebut di atas Korem 022/PT menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya.
- b. Menyelenggarakan pembinaan kesiapan teritorial di wilayahnya.
- c. Menyelenggarakan operasi pertahanan sesuai dengan kebijaksanaan Pangdam I/BB.
- d. Menyelenggarakan fungsi kegarnizunan berdasarkan kebijaksanaan Pangdam I/BB.
- e. Menyelenggarakan dan melaksanakan dukungan bantuan administrasi bagi Komando/Satuan/Badan yang berada di wilayah jajaran Korem 022/PT dalam rangka sistem pelayanan daerah.
- f. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengamanan daerah, instalasi, obyek vital nasional, kegiatan kenegaraan, keamanan fisik pejabat penting negara (VIP) dan tamu negaraserta pejabat perwakilan negara sahabat yang berada

di wilayah Korem 022/PT, dilaksanakan berdasarkan petunjuk serta kebijaksanaan Pangdam I/BB.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, organisasi Korem 022/PT disusun dalam dua tingkat:

- a. Tingkat Markas Korem terdiri dari:
 - 1) Eselon Pimpinan (Komandan Korem).
 - 2) Eselon Pembantu Pimpinan/Staf Korem (Skorem):
 - a) Kepala Staf Korem (Kasrem).
 - b) Seksi Intelijen Korem (Siintelrem).
 - c) Seksi Operasi Korem (Siopsrem).
 - d) Seksi Personel Korem (Sipersrem).
 - e) Seksi Logistik Korem (Silogrem).
 - f) Seksi Teritorial Korem (Siterrem).
 - 3) Eselon Badan Pelayanan:
 - a) Sekretariat Umum Korem (Setumrem).
 - b) Kompi Markas (Kimarem).
 - 4) Eselon Badan Pelaksana, Badan Pelaksana Organik Korem:
 - a) Pengumpulan dan Pengolahan Data Korem (Infolahtarem).
 - b) Pembinaan Jasmani Militer Korem (Jasrem).
 - c) Pembinaan Mental Korem (Bintalrem).
 - d) Penerangan dan Hubungan Masyarakat Korem (Penhumasrem).
 - e) Perwira Hukum Korem (Pakumrem).
 - 5) Dinas Jawatan/Badan Pelaksana non organik yang secara taktis dibawah Korem 022/PT:
 - a) Denpom I/1.
 - b) Denpal 01-12-01.
 - c) Denbekang 1-44-03.
 - d) Denkesyah 01-04-01.
 - e) Denhubrem 022/PT.
 - f) Ajenrem 022/PT.
 - g) Sub Denzibang 033/I.

- h) Pekas Gabrah-3 Na. 2-03-03.
- b. Tingkat Komando/Satuan Pelaksana:
 - 1) Komando Distrik Militer (Kodim):
 - a) Kodim 0203/Langkat di Binjai.
 - b) Kodim 0204/Deli Serdang di L. Pakam.
 - c) Kodim 0207/Simalungun di P. Siantar.
 - d) Kodim 0208/Asahan di Kisaran.
 - e) Kodim 0209/Labuhan Batu di R. Prapat.
 - 2) Batalyon Infanteri (Yonif 126/Kala Cakti):
 - a) Mayon dan Kima di Bunut Kisaran Kab. Asahan.
 - b) Kipan A di Tanjung Kasau Kab. Asahan.
 - c) Kiban di P. Raja Kab. Asahan.
 - d) Kipan B di Damuli Kab. L. Batu.
 - d) Kipan C di R. Prapat Kab. L. Batu.
 - 3) Tim Intelijen Korem
- c. Struktur organisasi Korem 022/PT pada lampiran 3.

4.3.2 Mengukur Tingkat Profesionalisme Satuan Operasional Jajaran Korem 022/PT

Untuk mengukur tingkat profesionalisme satuan operasional jajaran Korem 022/PT, maka berdasarkan gelar kekuatan satuan di atas, selanjutnya digambarkan struktur jabatan perwira pada organisasi satuan operasional dan Markas Korem yang menjadi obyek penelitian (pada lampiran 4). Berdasarkan struktur jabatan perwira pada organisasi satuan operasional jajaran Korem, ditetapkan responden penelitian yang berasal dari personel perwira di lingkungan Makorem 022/PT, Kodim 0207/SML, dan Yonif 126/KC berjumlah 18 orang. Berdasarkan kepangkatan, responden terdiri dari perwira menengah berjumlah 6 orang, yang berpangkat Letkol 3 responden tersebar masing-masing 1 orang di tiga satuan, dan yang berpangkat Mayor 3 responden bertugas di Makorem. Sementara itu perwira pertama yang menjadi responden penelitian berjumlah 12 responden dengan rincian 9 responden berpangkat Kapten, 2 responden berpangkat Lettu, dan 1 responden berpangkat Letda. Dari 12 responden tersebut 1 responden

berpangkat Kapten bertugas di Makorem, sedangkan 5 responden bertugas di Kodim. Sementara itu yang bertugas di Yonif berjumlah 6 responden dengan rincian 3 responden berpangkat Kapten, 2 responden berpangkat Lettu dan 1 responden berpangkat Letda. Dengan demikian dilihat dari sebaran kepangkatan personel responden, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sebaran Responden Berdasarkan Pangkat dan Satuan

No	Kategori Perwira	Pangkat	Makorem	Kodim	Yonif	Jumlah
1	Perwira Menengah	Letnan Kolonel	1	1	1	3
		Mayor	3	-	-	3
2	Perwira Pertama	Kapten	1	5	3	9
		Letnan Satu	-	-	2	2
		Letnan Dua	-	-	1	1
Jumlah			5	6	7	18

Dari aspek usia responden penelitian, yang dikategorikan sebagai perwira menengah berusia 39 - 46 tahun, kepangkatan Letnan Kolonel 40 - 46 tahun dan Mayor dengan usia 39 tahun. Untuk perwira pertama berusia 23 - 55 tahun. Kepangkatan Kapten berusia 31 - 55 tahun, Letnan Satu 47 tahun, dan Letnan Dua 23 tahun. Dilihat dari masa penugasan, kategori perwira menengah berkisar 16 - 21 tahun. Untuk yang berpangkat Letnan Kolonel masa kerjanya berkisar dari 19 - 21 tahun. Sedangkan yang berpangkat Mayor mempunyai masa kerja antara 16 sampai 17 tahun. Apabila dilihat dari masa kerja aktif di kesatuannya, pada umumnya berdinis sejak Februari 2006 sampai dengan Juni 2010 (4 tahun 4 bulan). Bagi perwira menengah masa kerja aktif di kesatuannya sejak bulan Februari 2009 - Juni 2010. Pamen berpangkat Letnan Kolonel terhitung mulai bulan Januari - Juni 2010, sedangkan yang berpangkat Mayor terhitung mulai bulan Februari 2009 - Juni 2010. Untuk kelompok perwira pertama yang berpangkat Kapten, terhitung mulai bulan Februari 2006 - Juni 2010, yang berpangkat Letnan Satu mulai bulan Maret 2009 - Juni 2010, dan Letnan Dua terhitung mulai bulan Januari 2010. Secara rinci terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pangkat, Usia, Masa Kerja dan Masa Dinas Aktif di Kesatuan Jajaran Korem 022/PT

No	Kategori Perwira	Pangkat	Usia Terendah - Tertinggi	Masa Kerja Perwira	Masa Dinas Aktif di Kesatuan
1	Perwira Menengah	Letnan Kolonel	40 - 46	19 - 21	Januari - Juni 2010
		Mayor	39	16 - 17	Februari 2009 - Juni 2010
2	Perwira Pertama	Kapten	31 - 55	9 - 32	Februari 2006 - Juni 2010
		Letnan Satu	47	27 - 28	Maret 2009 - Juni 2010
		Letnan Dua	23	16	Januari 2010

4.3.3 Kondisi Profesionalisme

Mengacu kepada kriteria profesionalisme seperti yang dikemukakan oleh Huntington, maka kondisi profesionalisme yang akan diuraikan dalam pembahasan ini mendeskripsikan profesionalisme di satuan operasional jajaran Korem 022/PT berdasarkan pendapat responden atas sejumlah pernyataan mengenai:

- a. Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan.
- b. Memadainya sumber kekuatan (jumlah personel, peralatan penunjang; persenjataan).
- c. Sesuainya pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan.
- d. Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan.
- e. Kesesuaian kewenangan dengan kompetensi (kemampuan).
- f. Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan.
- g. Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- h. Konsistensi jadwal durasi latihan.
- i. Teraturnya perencanaan operasi kesatuan.
- j. Menunjangnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun diluar pertempuran.

- k. Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD.
- l. Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan.
- m. *Cross check* akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan.
- n. Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan.
- o. Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat.
- p. Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan.
- q. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi.
- r. Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan.
- s. Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan.
- t. Tidak perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan.
- u. Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan.
- v. Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota.
- w. Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan.

Berdasarkan pengelompokan jawaban yang dikategorikan menurut kelompok pernyataan **YA** dan **TIDAK**, maka responden penelitian yang menyatakan **YA/TIDAK** atas indikator profesionalisme menurut Huntington, dapat terlihat seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Kondisi Profesionalisme yang Dinyatakan Oleh Responden

No	Pernyataan	Makorem		Kodim		Yonif	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Aspek Keahlian:						
1	Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan	5	-	2	4	-	7

Tabel 4.3 (Sambungan)

2	Memadainya sumber kekuatan (Jumlah Personel, Peralatan penunjang; Persenjataan)	5	-	1	5	1	6
3	Sesuaiinya pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan	5	-	6	-	7	-
4	Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan	5	-	6	-	7	-
5	Sesuaiinya kewenangan dengan kompetensi (kemampuan)	4	1	4	2	4	3
6	Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan	5	-	6	-	7	-
7	Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya	5	-	6	-	7	-
8	Konsistensi jadwal durasi latihan	1	4	2	4	1	6
9	Teraturnya perencanaan operasi kesatuan berjalan	5	-	6	-	7	-
10	Menunjingnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran	5	-	6	-	7	-
B	Aspek Tanggungjawab:						
11	Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD	5	-	6	-	6	1
12	Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan	4	1	6	-	7	-
13	<i>Cross check</i> akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan	5	-	6	-	7	-
14	Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan	1	4	2	4	3	4

Tabel 4.3 (Sambungan)

15	Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat	-	5	-	6	-	7
C	Aspek Rasa Sejawat:						
16	Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan	-	5	-	6	-	7
17	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi	-	5	-	6	-	7
18	Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan	5	-	6	-	7	-
19	Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan	4	1	6	-	6	1
20	Tidak perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan	4	1	6	-	7	-
21	Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan	5	-	6	-	7	-
22	Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota	5	-	3	3	4	3
23	Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan	-	5	-	6	-	7

Berdasarkan data di atas, maka di antara pernyataan YA yang dikemukakan oleh responden, terdapat perbedaan pernyataan yang berhubungan dengan:

- a. Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan, dimana pada lingkungan Yonif terjadi ketidaksesuaian antara spesialisasi keahlian yang dimiliki responden dengan tugasnya di kesatuan tersebut, sementara di

Kodim terdapat dua responden yang menyatakan tidak sesuai, sedangkan di Makorem dinyatakan telah sesuai.

- b. Memadainya sumber kekuatan kesatuan (meliputi personel, peralatan penunjang dan persenjataan), dimana di lingkungan Kodim dan Yonif pada umumnya sumber kekuatan kesatuan tidak memadai sementara itu di lingkungan Makorem telah memadai.
- c. Pada umumnya belum terjadi kesesuaian kewenangan dengan kompetensi (kemampuan) dari pelaksanaan tugas/tanggungjawab jabatan, baik pada satuan Kodim dan Yonif termasuk di Makorem, meskipun ketidaksesuaian di lingkungan Makorem dan Kodim relatif kecil.
- d. Terdapat pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD lingkungan Makorem dan Kodim, sementara di lingkungan Yonif masih terdapat responden yang menyatakan tidak ada pelatihan dimaksud.

Sedangkan kelompok pernyataan responden yang menyatakan **TIDAK** atas sejumlah indikator profesionalisme yang dinyatakan oleh Huntington terdapat lima pernyataan yang dikemukakan responden terhadap perbedaan mengenai:

- a. Konsistensi jadwal durasi latihan, dimana responden di lingkungan Makorem, Kodim, dan Yonif pada umumnya menyatakan adanya ketidak konsistenan jadwal durasi latihan meskipun beberapa orang menyatakan hal yang berbeda.
- b. Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan di masing-masing satuan terdapat pernyataan yang berbeda mengenai hal tersebut, namun pada umumnya di setiap satuan dapat dikelompokkan adanya ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan pekerjaannya.
- c. Pendapatnya mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan, dimana pada lingkungan Makorem dan Yonif masih terdapat responden yang menyatakan sependapat, sementara di lingkungan Kodim menyatakan tidak sependapat.

- d. Peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan pada umumnya seluruh kesatuan tidak sependapat, namun demikian satu responden di Makorem dan Yonif menyatakan sependapat.
- e. Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan pada umumnya semua kesatuan menyatakan sependapat kecuali satu responden dari makorem menyatakan hal yang berbeda.

4.3.3.1 Aspek profesionalisme Makorem 022/PT

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data, maka unsur-unsur profesionalisme yang dapat diukur di lingkungan Makorem 022/PT, dengan hasil yang pada umumnya dinyatakan **YA** oleh responden terdapat 84 pernyataan. Sedangkan yang dinyatakan **TIDAK** terhadap unsur-unsur pernyataan profesionalisme terdapat 31 pernyataan. Secara rinci tampak seperti pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Kondisi Profesionalisme Makorem 022/PT

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan	5	-
2	Memadainya sumber kekuatan (Jumlah Personel, Peralatan penunjang; Persenjataan)	5	-
3	Sesuaiinya pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan	5	-
4	Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan	5	-
5	Kesesuaian kewenangan dengan kompetensi (kemampuan)	4	1
6	Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan	5	-
7	Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya	5	-
8	Konsistensi jadwal durasi latihan	1	4
9	Teraturnya perencanaan operasi kesatuan	5	-

Tabel 4.4 (Sambungan)

10	Menunjangnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran	5	-
11	Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD	5	-
12	Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan	4	1
13	Cross check akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan	5	-
14	Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan	1	4
15	Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat	-	5
16	Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan	-	5
17	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi	-	5
18	Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan	5	-
19	Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan	4	1
20	Tidak perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan	5	-
21	Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan	5	-
22	Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota	5	-
23	Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan	-	5

Melalui tabel tersebut di atas, setiap aspek dari profesionalisme dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Aspek keahlian dari profesionalisme.** Aspek keahlian di lingkungan Makorem 022/PT dapat dinilai dari pernyataan responden atas unsur-unsur keahlian yang terdiri dari 50 pernyataan yang pada umumnya dinyatakan

YA sejumlah 45 pernyataan. Sedangkan 5 pernyataan dinyatakan **TIDAK** oleh para responden. Hal-hal yang dinyatakan **TIDAK** menunjukkan kekurangan keahlian dari aspek profesionalisme dan memerlukan peningkatan yaitu terdapat adanya ketidaksesuaian kewenangan dengan kompetensi (kemampuan), dan belum adanya konsistensi jadwal durasi latihan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Aspek Keahlian Makorem 022/PT

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan	5	-
2	Memadainya sumber kekuatan (Jumlah Personel, Peralatan penunjang; Persenjataan)	5	-
3	Sesuaiinya pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan	5	-
4	Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan	5	-
5	Kesesuain kewenangan dengan kompetensi (kemampuan)	4	1
6	Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan	5	-
7	Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya	5	-
8	Konsistensi jadwal durasi latihan	1	4
9	Teraturnya perencanaan operasi kesatuan	5	-
10	Menunjingnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran	5	-

- b. **Aspek tanggungjawab dari profesionalisme.** Aspek tanggungjawab di lingkungan Makorem 022/PT dapat dinilai dari pernyataan responden atas unsur-unsur tanggungjawab yang memiliki 25 pernyataan. Pada umumnya pernyataan dari unsur-unsur tanggungjawab dinyatakan **YA** sejumlah 15 pernyataan. Sedangkan 10 pernyataan dinyatakan **TIDAK** oleh para responden. Hal-hal yang dinyatakan **YA** memberikan gambaran bahwa aspek tanggungjawab di lingkungan Makorem sudah terpenuhi. Namun

demikian responden yang menyatakan **TIDAK** menunjukkan bahwa masih adanya unsur-unsur tanggungjawab yang belum dipenuhi dalam rangka mewujudkan profesionalisme yaitu masih adanya kurang pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal satuan dan belum adanya kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan, serta belum memadainya intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Aspek Tanggungjawab Makorem 022/PT

11	Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD	5	-
12	Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal	4	1
13	<i>Cross check</i> akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan	5	-
14	Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan	1	4
15	Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat	-	5

- c. **Aspek rasa sejawat dari profesionalisme.** Aspek rasa sejawat di lingkungan Makorem 022/PT dapat dinilai dari pernyataan responden atas unsur-unsur rasa sejawat yang memiliki 40 pernyataan. Pada umumnya pernyataan dari unsur-unsur rasa sejawat dinyatakan **YA** dengan 23 pernyataan. Sedangkan 17 pernyataan dinyatakan **TIDAK** oleh para responden. Hal-hal yang dinyatakan **YA** memberikan gambaran bahwa aspek rasa sejawat di lingkungan Makorem sudah terpenuhi. Namun demikian responden yang menyatakan **TIDAK** menunjukkan bahwa masih adanya unsur-unsur rasa sejawat yang belum dipenuhi untuk mewujudkan profesionalisme yaitu masih adanya pendapat tentang perlunya peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk peningkatan kemampuan, perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer diluar

kesatuan, masih adanya responden yang sependapat tentang adanya anggota kesatuan yang dipercayakan untuk memegang jabatan diluar kesatuan, masih adanya anggota yang tidak sependapat bahwa kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat profesionalisme, serta perlunya peningkatan jalinan kerjasama dan soliditas sesama anggota kesatuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Aspek Rasa Sejawat Makorem 022/PT

16	Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan	-	5
17	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi	-	5
18	Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan	5	-
19	Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan	4	1
20	Tidak perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan	5	-
21	Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan	5	-
22	Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota	5	-
23	Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan	-	5

Berdasarkan pembahasan dan penganalisaan seperti yang telah diuraikan di atas, dilihat dari jumlah *item* pernyataan yang diajukan kepada responden, maka pembangunan profesionalisme di lingkungan Makorem dapat disimpulkan bahwa aspek keahlian telah memenuhi derajat profesionalitas, sedangkan aspek tanggungjawab dan aspek rasa sejawat perlu adanya peningkatan pembinaan. Secara jelas terlihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Komposisi Profesionalisme Makorem

Profesionalisme	Banyaknya Item Pernyataan yang Dinyatakan YA	Banyaknya Item Pernyataan yang Dinyatakan TIDAK
Keahlian	45	5
Tanggungjawab	15	10
Rasa Sejawat	24	16
Jumlah	84	31

4.3.3.2 Profesionalisme Kodim 0207/SML

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data, maka unsur-unsur profesionalisme yang dapat diukur di lingkungan Kodim 0207/SML, sesuai dengan hasil yang dinyatakan **YA** oleh responden terdapat 92 pernyataan. Sedangkan yang dinyatakan **TIDAK** terhadap unsur-unsur pernyataan profesionalisme terdapat 46 pernyataan, secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kondisi Profesionalisme Kodim 0207/SML

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan	2	4
2	Memadainya sumber kekuatan (Jumlah Personel, Peralatan penunjang, Persenjataan)	1	5
3	Sesuai pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan	6	-
4	Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan	6	-
5	Kesesuaian kewenangan dengan kompetensi (kemampuan)	4	2
6	Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan	6	-
7	Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya	6	-
8	Konsistensi jadwal durasi latihan	2	4
9	Teraturnya perencanaan operasi kesatuan	6	-

Tabel 4.9 (Sambungan)

10	Menunjangnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran	6	-
11	Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD	6	-
12	Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan	6	-
13	Cross check akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan	6	-
14	Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan	2	4
15	Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat	-	6
16	Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan	-	6
17	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi	-	6
18	Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan	6	-
19	Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan	6	-
20	Tidak perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan	6	-
21	Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan	6	-
22	Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota	3	3
23	Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan	-	6

- a. **Aspek keahlian Dari profesionalisme Kodim 0207/SML.** Dari jawaban responden di lingkungan Kodim 0207/SML, berdasarkan hasil pengolahan data menggambarkan bahwa aspek keahlian pada umumnya masih memerlukan peningkatan dari para personelnnya. Hal yang utama yang menjadi perhatian adalah kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugasnya, **Universitas Pertahanan**

penggunaan sumber kekuatan berupa alat dan persenjataan yang memadai, dan perlunya kesesuaian kewenangan dengan kompetensi, serta perlunya konsistensi jadwal durasi latihan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Aspek Keahlian Kodim 0207/SML

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan	2	4
2	Memadainya sumber kekuatan (Jumlah Personel, Peralatan penunjang; Persenjataan)	1	5
3	Sesuaiinya pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan	6	-
4	Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan	6	-
5	Kesesuaian kewenangan dengan kompetensi (kemampuan)	4	2
6	Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan	6	-
7	Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya	6	-
8	Konsistensi jadwal durasi latihan	2	4
9	Teraturnya perencanaan operasi kesatuan	6	-
10	Menunjangnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran	6	-

- b. **Aspek tanggungjawab dari profesionalisme Kodim 0207/SML.** Aspek tanggungjawab dari profesionalisme di lingkungan Kodim 0207/SML menurut responden pada umumnya membutuhkan kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaannya dan perlunya peningkatan intensitas keterlibatan satuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Seperti dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Aspek Tanggungjawab Kodim 0207/SML

11	Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD	6	-
12	Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan	6	-
13	<i>Cross check</i> akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan	6	-
14	Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan	2	4
15	Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat	-	6

- c. **Aspek rasa sejawat dari profesionalisme Kodim 0207/SML.** Aspek rasa sejawat dari profesionalisme di Kodim 0207/SML yang dinyatakan **YA** oleh para responden mencerminkan adanya derajat pencapaian profesionalisme dari aspek kesejawatan. Sedangkan responden yang menyatakan **TIDAK** mencerminkan perlunya peningkatan dalam aspek pendidikan dan keterampilan yang dimiliki anggota, dan perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan, serta perlunya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan. Secara jelas aspek kesejawatan Kodim 0207/SML dapat terlihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12 Aspek Rasa Sejawat Kodim 0207/SML

16	Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan	-	6
17	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi	-	6
18	Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan	6	-
19	Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan	6	-

Tabel 4.12 (Sambungan)

20	Tidak perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan	6	-
21	Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan	6	-
22	Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota	3	3
23	Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan	-	6

Berdasarkan data dan uraian di atas, dilihat dari jumlah *item* pernyataan yang diajukan kepada responden di lingkungan Kodim, maka derajat profesionalisme diawali dengan aspek keahlian dan selanjutnya diperlukan peningkatan pada aspek tanggungjawab dan rasa sejawat untuk dapat mencapai tingkat profesionalisme Kodim 0207/SML yang diharapkan. Secara jelas tampak pada tabel 4.13.

Tabel 4.13 Komposisi Profesionalisme Kodim 0207/SML

Profesionalisme	Banyaknya Item Pernyataan yang Dinyatakan Ya	Banyaknya Item Pernyataan yang Dinyatakan Tidak
Keahlian	45	15
Tanggungjawab	20	10
Rasa Sejawat	27	21
Jumlah	92	46

4.3.3.3 Profesionalisme Yonif 126/KC

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data, maka unsur-unsur profesionalisme di lingkungan Yonif 126/KC dapat dianalisa melalui hasil pernyataan responden yang dinyatakan **YA** dan **TIDAK**. Pernyataan responden yang dinyatakan **YA** terdapat 102 pernyataan. Sedangkan yang dinyatakan **TIDAK** terhadap unsur-unsur pernyataan profesionalisme terdapat 59 pernyataan. Secara rinci tampak pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Kondisi Profesionalisme Yonif 126/KC

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan	-	7
2	Memadainya sumber kekuatan (Jumlah Personel, Peralatan penunjang; Persenjataan)	1	6
3	Sesuaiinya pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan	7	-
4	Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan	7	-
5	Kesesuain kewenangan dengan kompetensi (kemampuan)	4	3
6	Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan	7	-
7	Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya	7	-
8	Konsistensi jadwal durasi latihan	1	6
9	Teraturnya perencanaan operasi kesatuan	7	-
10	Menunjangnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran	7	-
11	Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD	6	1
12	Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan	7	-
13	Cross check akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan	7	-
14	Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan	3	4
15	Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat	-	7
16	Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan	-	7
17	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi	-	7
18	Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan	7	-
19	Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan	6	1

Tabel 4.14 (Sambungan)

20	Tidak perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan	7	-
21	Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan	7	-
22	Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota	4	3
23	Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan	-	7

- a. **Aspek keahlian dari profesionalisme Yonif 126/KC.** Aspek Keahlian dari profesionalisme di Yonif 126/KC mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan, tidak memadainya sumber kekuatan yang tersedia di kesatuan tersebut. Masih terdapat adanya ketidaksesuaian kewenangan dengan kompetensi, serta kurangnya konsistensi jadwal durasi latihan di kesatuan. Secara jelas tampak pada tabel 4.15.

Tabel 4.15 Aspek Keahlian Yonif 126/KC

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Kesesuaian spesialisasi keahlian dengan tugas di kesatuan	-	7
2	Memadainya sumber kekuatan (Jumlah Personel, Peralatan penunjang; Persenjataan)	1	6
3	Sesuai pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan	7	-
4	Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan	7	-
5	Kesesuaian kewenangan dengan kompetensi (kemampuan)	4	3
6	Ketidaksulitan dalam mengorganisasi pekerjaan	7	-
7	Ketidaksulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya	7	-

Tabel 4.15 (Sambungan)

8	Konsistensi jadwal durasi latihan	1	6
9	Teraturnya perencanaan operasi kesatuan	7	-
10	Menunjangnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran	7	-

- b. **Aspek tanggungjawab dari profesionalisme Yonif 126/KC.** Aspek tanggungjawab dari profesionalisme di Yonif 126/KC yang dinyatakan **YA** oleh responden mencerminkan adanya perwujudan aspek tanggungjawab dari profesionalisme. Sedangkan pernyataan responden yang masih dinyatakan **TIDAK** mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan dari aspek tanggungjawab yaitu masih perlu adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial, perlunya penyesuaian keahlian yang dimiliki oleh personel dengan pekerjaannya, serta adanya peningkatan intensitas keterlibatan satuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16 Aspek Tanggungjawab Yonif 126/KC

11	Adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD	6	1
12	Pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan	7	-
13	<i>Cross check</i> akan kebenaran informasi yang saya terima dari kesatuan	7	-
14	Kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan	3	4
15	Telah memadai intensitas keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat	-	7

- c. **Aspek rasa sejawat dari profesionalisme Yonif 126/KC.** Pernyataan responden yang menyatakan **YA** terhadap aspek rasa sejawat dari profesionalisme mencerminkan telah terbangunnya aspek rasa sejawat di lingkungan Yonif 126/KC. Namun demikian pernyataan responden yang menyatakan **TIDAK** terhadap aspek rasa sejawat menggambarkan bahwa masih terdapat perlunya peningkatan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota kesatuan, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di kesatuan, serta perlunya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan. Disamping itu perlu adanya pemahaman kepada anggota kesatuan dengan adanya responden yang menyatakan kesepakatannya terhadap adanya anggota kesatuan yang dipercaya menjabat diluar kesatuan. Secara jelas tampak pada tabel 4.17.

Tabel 4.17 Aspek Rasa Sejawat Yonif 126/KC

16	Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam peningkatan kemampuan	-	7
17	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan berjalan efektif dan sinergi	-	7
18	Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan	7	-
19	Tidak sependapat mengenai adanya anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan	6	1
20	Tidak Perlu peninjauan kembali terhadap hierarki kepangkatan di kesatuan	7	-
21	Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan	7	-
22	Kesesuaian pengisian posisi jabatan dengan kepangkatan anggota	4	3
23	Tidak perlu adanya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan	-	7

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka kondisi profesionalisme pada lingkungan Yonif 126/KC yang telah terbangun diawali dengan bobot pada

aspek keahlian dan selanjutnya pada aspek tanggungjawab, serta aspek rasa sejawat. Masih diperlukan berbagai peningkatan kemampuan pada seluruh aspek profesionalisme di satuan Yonif 126/KC. Secara rinci terlihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18 Komposisi Profesionalisme Yonif 126/KC

Yonif 126/KC	Banyaknya Item Pernyataan Yang dinyatakan Ya	Banyaknya Item Pernyataan Yang dinyatakan Tidak
Keahlian	48	22
Tanggungjawab	23	12
Rasa Sejawat	31	25
Jumlah	102	59

4.4 Pengembangan Strategi Pembinaan Profesionalisme Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara di Korem 022/PT

Dari hasil penelitian mengenai profesionalisme di lingkungan jajaran Korem 022/PT, sebagaimana dikemukakan pada sub bab di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kondisi profesionalisme di satuan jajaran Korem 022/PT masih bervariasi. Berdasarkan indikator penelitian yang dirumuskan dari definisi profesionalisme militer secara konvensional menurut Huntington, maka komposisi profesionalisme satuan di jajaran Korem 022/PT dapat terlihat seperti pada tabel 4.19.

Tabel 4.19 Komposisi Profesionalisme di Satuan Jajaran Korem 022/PT

Aspek Profesionalisme di Satuan Jajaran Korem 022/PT	Pernyataan "Ya"			Pernyataan "Tidak"		
	Makorem	Kodim	Yonif	Makorem	Kodim	Yonif
Aspek Keahlian	45	45	48	5	15	22
Aspek Tanggungjawab	15	20	23	10	10	12
Aspek Rasa Sejawat	24	27	31	16	21	25
Jumlah	84	92	102	31	46	59

Berdasarkan dari tabel data di atas, maka kondisi profesionalisme militer atau profesionalisme korps pada satuan jajaran Korem 022/PT dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari aspek keahlian secara akumulatif Makorem 022/PT lebih baik daripada Kodim 0207/SML dan Yonif 126/KC, sedangkan Kodim 0207/SML lebih baik daripada Yonif 126/KC.
- b. Dari aspek tanggungjawab secara akumulatif Yonif 126/KC lebih baik dari Makorem 022/PT dan Kodim 0207/SML, sedangkan Makorem 022/PT lebih baik dari Kodim 0207/SML.
- c. Dari aspek rasa sejawat secara akumulatif Kodim 0207/SML lebih baik dari Yonif 126/KC dan Makorem 022/PT, sedangkan Yonif 126/KC lebih baik dari Korem 022/PT.

Untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian profesionalisme satuan jajaran Korem 022/PT dan hal-hal yang perlu perbaikan dan peningkatan, maka dapat dilihat dalam matrik pernyataan responden mengenai pencapaian tingkat profesionalisme, yang dibuat seperti pada tabel 4.20.

Tabel 4.20 Matriks Pernyataan Mengenai Profesionalisme

Aspek Profesionalisme	Butir Pernyataan	Makorem		Kodim		Yonif	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Keahlian	1	5	-	2	4	-	7
	2	5	-	1	5	1	6
	3	5	-	6	-	7	-
	4	5	-	6	-	7	-
	5	4	1	4	2	4	3
	6	5	-	6	-	7	-
	7	5	-	6	-	7	-
	8	1	4	2	4	1	6
	9	5	-	6	-	7	-
	10	5	-	6	-	7	-
Jumlah		45	5	45	15	48	22

Tabel 4.20 (Sambungan)

Tanggungjawab	11	5	-	6	-	6	1
	12	4	1	6	-	7	-
	13	5	-	6	-	7	-
	14	1	4	2	4	3	4
	15	-	5	-	6	-	7
Jumlah		15	10	20	10	23	12
Rasa Sejawat	16	-	5	-	6	-	7
	17	-	5	-	6	-	7
	18	5	-	6	-	7	-
	19	4	1	6	-	6	1
	20	5	-	6	-	7	-
	21	4	1	6	-	7	-
	22	5	-	3	3	4	3
	23	-	5	-	6	-	7
Jumlah		23	17	27	21	31	25

Berdasarkan matrik tersebut diatas maka dapat disimpulkan tentang kondisi tingkat penguasaan terhadap profesionalisme yang telah dicapai setiap satuan, dan menunjukkan pula unsur-unsur dari ketiga aspek profesionalisme yang perlu menjadi perhatian dalam rangka terwujudnya profesionalisme militer pada satuan jajaran Korem 022/PT, yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a. **Aspek keahlian.** Dari sepuluh indikator yang menjadi perhatian dan sudah terwujud adalah sebagai berikut:
- 1) Sesuainya pembagian tugas dan wewenang dengan hierarki jabatan yang ditetapkan.
 - 2) Tidak ada kesulitan dalam mengorganisasi pekerjaan.
 - 3) Tidak ada kesulitan dalam melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
 - 4) Teraturnya perencanaan operasi kesatuan.
 - 5) Menunjangnya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran.

Dengan demikian yang menjadi perhatian dari aspek ini adalah perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan bagi personel militer di satuan jajaran Korem 022/PT.

- b. **Aspek tanggungjawab.** Dilihat dari aspek tanggungjawab, maka dari lima indikator yang menjadi perhatian dari para responden baru menunjukkan satu unsur indikator positif dari aspek tanggungjawab yaitu adanya *cross check* akan kebenaran informasi yang diterima dari kesatuan. Dengan demikian unsur-unsur yang menjadi perhatian dan peningkatan dalam aspek tanggungjawab guna meningkatkan profesionalisme adalah sebagai berikut:

- 1) Masih diperlukan adanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial.
- 2) Masih diperlukan adanya pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal satuan.
- 3) Masih diperlukan kesesuaian keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada di kesatuan.

- c. **Aspek rasa sejawat.** Dilihat dari aspek rasa sejawat, maka dari delapan indikator yang telah memenuhi kriteria profesionalisme adalah:

- 1) Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan.
- 2) Tidak ada perlu adanya peninjauan kembali hierarki kepangkatan di kesatuan.
- 3) Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan sebagai anggota kesatuan.

Dengan demikian hal yang menjadi perhatian dan perlunya peningkatan dalam upaya mewujudkan profesionalisme adalah:

- 1) Peningkatan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki anggota kesatuan.
- 2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan.

- 3) Perlunya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan.
- 4) Perlunya kesesuaian pengisian jabatan dengan kepangkatan anggota.

4.4.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Dalam Pembinaan Profesionalisme di Kesatuan Operasional Korem 022/PT

Kekuatan dan Kelemahan merupakan faktor internal yang mempengaruhi pembinaan profesionalisme yang berasal dari lingkungan dalam kesatuan sedangkan tantangan dan peluang adalah faktor yang mempengaruhi pembinaan profesionalisme dari luar lingkungan satuan. Identifikasi terhadap faktor internal yaitu berupa kekuatan dan kelemahan didasarkan pada adanya persamaan dan perbedaan pernyataan yang dinyatakan oleh responden sebagai berikut:

a. Kekuatan. Kekuatan yang ada dalam pembinaan profesionalisme militer di Korem 022/PT adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan pembagian tugas berdasarkan hierarki jabatan yang telah ditetapkan.
- 2) Perencanaan operasi kesatuan yang bersifat teratur.
- 3) Adanya pengarahan dan pengendalian kegiatan operasional satuan dalam pertempuran maupun di luar pertempuran.
- 4) *Cross check* akan kebenaran informasi yang diterima dari kesatuan.
- 5) Kemampuan personel mengorganisasi pekerjaan.
- 6) Kemampuan dalam melengkapinya pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- 7) Kebanggaan berprofesi sebagai anggota kesatuan.
- 8) Adanya hierarki kepangkatan di kesatuan.
- 9) Adanya pendapat bahwa kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan dan derajat keprofesionalan pada salah satu kesatuan.

b. Kelemahan. Kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam pembinaan profesionalisme di Korem 022/PT adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan bagi personel militer di kesatuan.

- 2) Tidak meratanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD pada semua kesatuan.
- 3) Ada ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang ada pada salah satu kesatuan.
- 4) Tidak meratanya pemahaman atas kondisi negara terhadap urusan internal kesatuan pada salah satu kesatuan.
- 5) Tidak meratanya kesesuaian antara spesialisasi keahlian dengan tugas personel pada salah satu kesatuan operasional.
- 6) Perlunya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota kesatuan.
- 7) Perlunya kesesuaian dalam pengisian jabatan dengan kepangkatan anggota kesatuan.
- 8) Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan.
- 9) Perlunya peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan.

c. **Peluang.** Peluang yang berkaitan dengan pembinaan profesionalisme militer di lingkungan Korem 022/PT dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Bagian dari TNI sebagai kekuatan utama usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
- 2) Bagian dari TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 3) Bagian dari TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara untuk : (1) mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; (2) melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; (3) melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan (4) ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
- 4) Pelaksana tugas TNI matra darat di bidang: (1) pertahanan; (2) menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; (3)

pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta (4) pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

d. Tantangan/Hambatan. Terdapat beberapa tantangan/hambatan yang berhubungan dengan pembinaan profesionalisme militer, yaitu:

- 1) Transformasi peran TNI yang bersifat nasional.
- 2) Ketatnya hierarki komando yang harus berhadapan dengan dinamika lokal.
- 3) Keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia.

4.4.2 Strategi Pembinaan

Strategi pembinaan yang dapat dilaksanakan dalam upaya peningkatan profesionalisme militer di Korem 022/PT seperti pada tabel 4.21.

Tabel 4.21 Matriks Analisis SWOT

Internal Kesatuan	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kejelasan pembagian tugas berdasarkan hierarki jabatan yang telah ditetapkan 2. Perencanaan operasi dan pengendalian kegiatan operasi satuan yang bersifat teratur 3. <i>Cross chek</i> akan kebenaran informasi yang diterima 4. Kemampuan personel dalam mengorganisir dan melengkapi pekerjaan yang menjadi kewajibannya 5. Kebanggaan profesi sebagai anggota kesatuan dan adanya hierarki kepangkatan 6. Kenaikan pangkat sebagai bukti keberhasilan 	<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak meratanya sumber kekuatan kesatuan pada salah satu satuan yang ada di lingkungan kesatuan 2. Tidak meratanya pelatihan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial sebagai prajurit TNI AD pada semua kesatuan 3. Adanya ketidaksesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya dan tidak meratanya kesesuaian antara spesialisasi keahlian dengan tugas dan kesesuaian dalam pengisian jabatan dengan kepangkatan anggota satuan 4. Adanya pendapat yang berbeda mengenai keterlibatan anggota kesatuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di luar kesatuan pada salah satu kesatuan 5. Perlunya jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan 6. Perlunya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan
--------------------------	--	--

Tabel 4.21 (Sambungan)

	Peluang:	Tantangan/Hambatan:
Eksternal Kesatuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian dari TNI sebagai kekuatan utama usaha pertahanan dan keamanan negara 2. Bagian dari TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara 3. Bagian dari TNI sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara matra darat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi peran jati diri tentara yang bersifat nasional. 2. Ketatnya hierarki komando yang harus berhadapan dengan dinamika lokal. 3. Keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut di atas, maka strategi yang diterapkan dalam pembinaan profesionalisme di lingkungan Satminkal jajaran Korem 022/PT sebagai berikut:

- a. Bersumber dari kekuatan dan peluang, yaitu dengan memupuk/ memperkokoh tumbuhnya disiplin dan jiwa korsa, meningkatkan kemahiran dan keterampilan penggunaan alat dan persenjataan, peningkatan kemampuan olah keprajuritan, peningkatan keterlibatan satuan dengan masyarakat dalam rangka penguasaan wilayah, serta memperkokoh hubungan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai upaya memaksimalkan peran TNI AD dalam pertahanan negara aspek darat.
- b. Bersumber dari kekuatan dan tantangan/hambatan, yaitu dengan membangun dan meningkatkan citra TNI AD yang mencerminkan jati diri TNI, membangun komunikasi sosial dengan semua elemen bangsa, membangkitkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dalam upaya menjaga dan memelihara keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa Indonesia.
- c. Bersumber dari kelemahan dan peluang, yaitu dengan melakukan penataan perimbangan kekuatan personel dan alutsista yang distandarisasikan, revitalisasi fungsi kepelatihan dan kompetensi jabatan pada organisasi satuan operasional/Satminkal, meningkatkan pemahaman terhadap peran TNI AD sesuai dengan paradigma baru peran TNI, serta menata komunikasi

yang harmonis (*role sharing*) dalam rangka membangun kekuatan pertahanan negara.

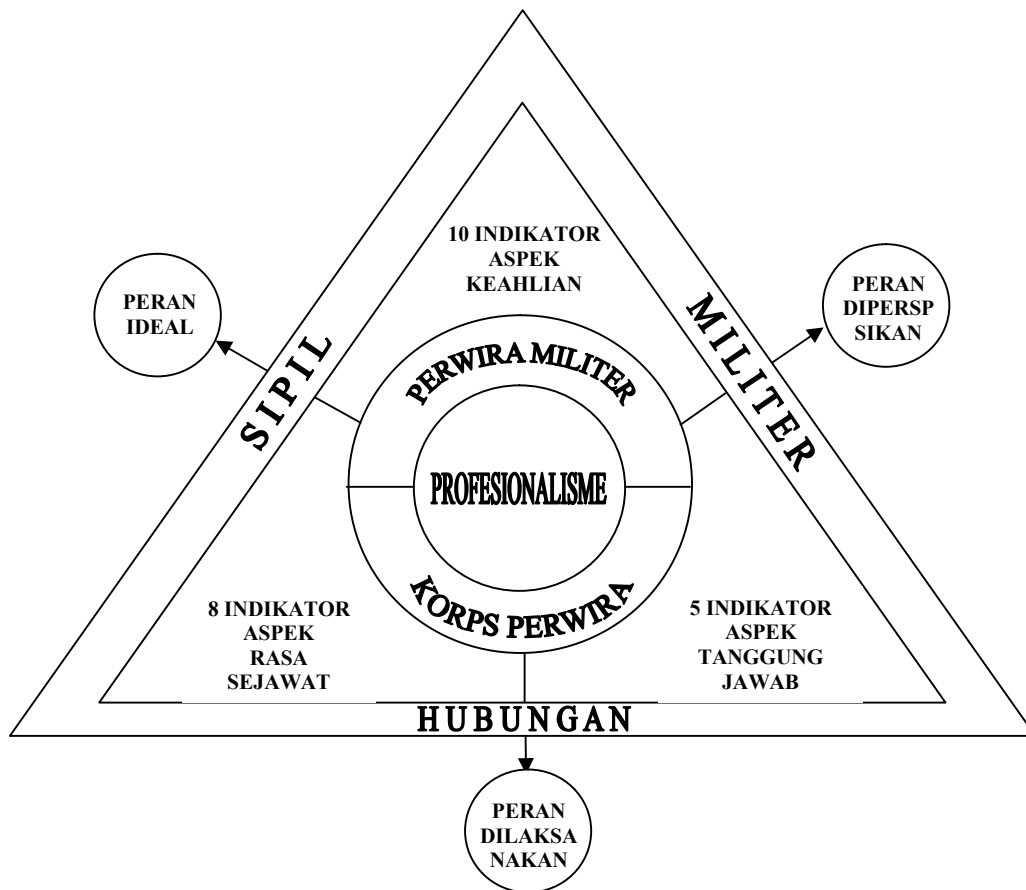
- d. Bersumber dari kelemahan dan tantangan/hambatan, yaitu meningkatkan durasi latihan, konsistensi pemanfaatan hasil pendidikan dengan pola karier prajurit, penataan gelar kekuatan satuan operasional/Satminkal secara konsisten, untuk mencapai standar kemampuan satuan yang disesuaikan kompetensi guna optimalisasi peran dan mencapai tugas pokok.

4.5 Perspektif Profesionalisme dan Pemahaman Profesionalisme TNI AD

Penelitian yang dilakukan di atas, telah berhasil dielaborasi perspektif profesionalisme yang mengacu pada pengertian profesionalisme militer yang dikemukakan oleh Huntington. Pada hakekatnya profesionalisme adalah keahlian yang harus dimiliki oleh kalangan militer untuk menggunakan kekerasan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yaitu penggunaan kemampuan dan kekuatan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan peran sebagai alat pertahanan negara. Dalam faham profesionalisme konvensional, profesionalisme militer adalah sebuah tanggungjawab yang dijalankan oleh seorang perwira dan korps perwira militer atas pelaksanaan peran yang dilakukannya. Profesionalisme militer sangat dipengaruhi oleh adanya sistem demokrasi yang mengedepankan supremasi sipil. Dengan demikian wujud profesionalisme militer sangat tergantung dengan keseimbangan berlangsungnya hubungan sipil-militer. Profesionalisme militer juga menyangkut keseimbangan antara keahlian, tanggungjawab, dan kebersamaan. Oleh karena itu persyaratan profesionalisme militer menurut Huntington, pertama adalah adanya spesialisasi fungsional dan penentuan peran/tugas yang jelas. Korps militer menjadi profesional bila hanya menjalankan satu peran yang spesial, sebagai alat pertahanan negara. Kedua adalah adanya keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan. Korps militer harus netral tidak terlibat dalam kegiatan politik dan setia pada satu institusi yaitu negara sebagai perwujudan otoritas bangsa. Ketiga adalah korps militer menjadi profesional bila didukung adanya pemerintahan yang maju dengan pola hubungan sipil-militer obyektif, sehingga akan mendapat penganggaran yang cukup karena perannya yang demikian penting dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa.

Melalui penjelasan tersebut di atas, maka dapat digambarkan diagram profesionalisme dan peran militer dalam negara demokrasi yang mengacu pada teori profesionalisme konvensional sebagai berikut:

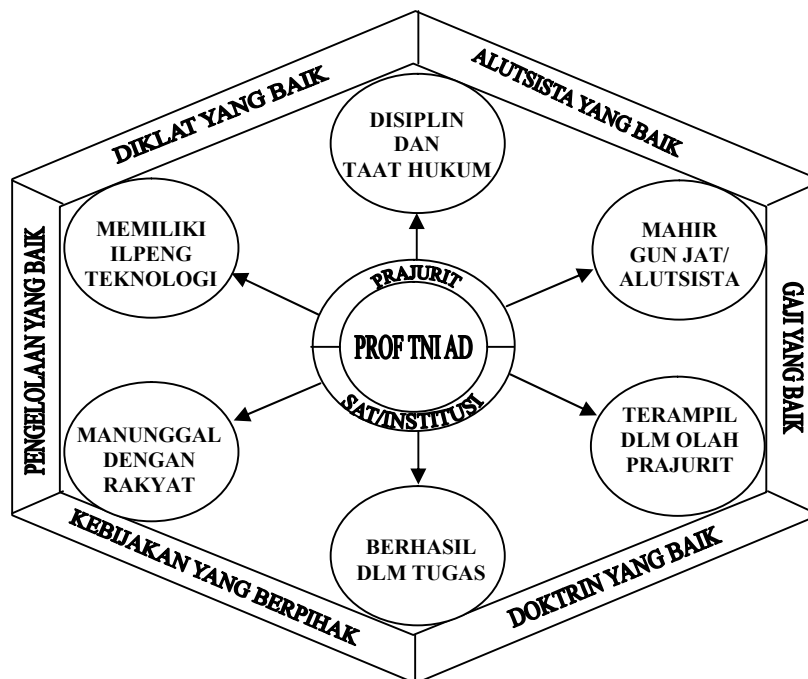
Gambar 4.1 Diagram Profesionalisme Konvensional



Sedangkan pemahaman subyek penelitian tentang makna profesionalisme TNI AD dalam era demokrasi, dijabarkan melalui Undang-Undang TNI pada pasal 2 (d) yaitu tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Namun demikian sesungguhnya secara eksploratif profesionalisme TNI AD dapat dimaknai sebagai bagian yang melekat dalam kehidupan setiap prajurit dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian profesionalisme TNI AD secara sederhana dapat dipahami sebagai

kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan benar, baik secara perorangan maupun kesatuan sesuai dengan deskripsi kerja/spesialisasi pada jabatan militer. Prajurit dikatakan profesional apabila mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya. Kedudukan dan pangkat yang berbeda akan membedakan tugas dan tanggungjawabnya, karena itu ukuran profesionalisme satu dengan yang lain akan berbeda pula. Standar yang menjadi ukuran profesionalisme prajurit TNI AD adalah kemahiran menggunakan senjata, disiplin dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Dengan kata lain tuntutan profesionalisme prajurit TNI AD adalah menguasai teknis kemiliteran, penguasaan alat persenjataan, kesiapsiagaan satuan yang tinggi, disiplin, dan taat hukum, serta memiliki tingkat pengetahuan sesuai dengan bidang tugas. Oleh sebab itu untuk mencapai kriteria profesionalisme seperti pernyataan tersebut di atas perlu adanya 6 persyaratan yang harus dipenuhi yaitu latihan yang baik (*well trained*), alutsista yang baik (*well equiped*), pengelolaan yang baik (*well managed*), gaji yang baik (*well paid*), dan kebijakan yang berpihak (*impartial policy*), serta doktrin yang baik (*well doctrine*). Dengan penjelasan tersebut di atas maka profesionalisme TNI AD dapat digambarkan kedalam diagram seperti terlihat di bawah ini.

Gambar 4.2 Diagram Persepsi Profesionalisme TNI AD



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peningkatan peran TNI AD dalam rangka mewujudkan kemampuan pertahanan negara dilaksanakan melalui pembinaan profesionalisme di tingkat satuan operasional/Satminkal. Pembinaan profesionalisme militer sangat penting untuk merubah pola pikir (*mind set*) dan perilaku prajurit serta menciptakan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Pengetahuan dan keterampilan militer (*military knowledge*) adalah komponen yang paling mendasar dan universal untuk mewujudkan tujuan dan peranan organisasi. Organisasi militer adalah pengelola manajemen kekerasan yang membutuhkan tingkat kemampuan dan keahlian khusus. Pembinaan profesionalisme TNI AD dalam era demokrasi memerlukan keselarasan antara kebijakan politik negara, doktrin organisasi, dan kondisi lingkungan yang berkembang, sehingga mampu memusatkan karakter pada tujuan, misi, dan peran organisasi. Keselarasan/keserasian tidak berarti permanen, namun berhubungan dengan upaya mempertahankan keadaan yang mantap. Dengan penjelasan tersebut di atas, melalui penelitian yang telah dilakukan, dapat menjawab sejauhmana pembinaan profesionalisme mampu mengoptimalkan peran TNI AD dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertahanan negara merupakan unsur sistem keamanan nasional, karena itu penyelenggaraan pertahanan negara harus mampu mewujudkan kemampuan dan kekuatan daya tangkal untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan negara. Penyusunan postur pertahanan negara yang kuat sesungguhnya bukan kemewahan dan pemborosan, namun menjadi kewajiban negara untuk menjamin kelangsungan tujuan nasional. Postur pertahanan negara yang kuat belum dapat diwujudkan karena peran ideal TNI AD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan/hukum yang berlaku belum mampu dilaksanakan oleh TNI AD dengan baik.

- b. Pemahaman hubungan sipil-militer dalam negara demokrasi yang sudah maju mengacu pada kontrol sipil obyektif, sehingga peranan ideal militer dapat dijalankan. Namun bagi negara yang sedang mengembangkan sistem demokrasi, peranan ideal dibatasi oleh kebijakan politik negara. Kontrol sipil terhadap militer dalam pengembangan sistem demokrasi di Indonesia, belum memberikan keseimbangan dan harapan atas keberhasilan pembangunan profesionalisme militer. Dengan pembatasan-pembatasan tersebut, pembangunan profesionalisme TNI AD akan mengikuti kontrol sipil tradisional, sehingga peranan ideal tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya peranan yang dipersepsikan.

- c. Sasaran pembinaan profesionalisme TNI AD adalah perubahan struktur, kultur, dan doktrin melalui penataan organisasi, sistem pendidikan dan latihan, guna mewujudkan profesionalisme keprajuritan dan profesionalisme institusional. Strategi pengembangan pembinaan profesionalisme dapat dilakukan melalui satuan operasional/Satminkal TNI AD dengan mengutamakan: (1) peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam penggunaan alat dan persenjataan; (2) peningkatan keterlibatan kesatuan dalam kegiatan masyarakat; (3) peningkatan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki para personel; (4) peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non militer di luar kesatuan; dan (5) peningkatan jalinan kerjasama dan solidaritas sesama anggota kesatuan.

5.2 Saran

Peran TNI AD di bidang pertahanan negara dapat ditingkatkan kemampuannya dengan pengembangan strategi pembinaan profesionalisme militer yang dilakukan melalui dua cara sebagai berikut:

- a. Dalam lingkungan TNI AD (internal) yaitu: (1) melakukan validasi dan penataan doktrin dan piranti lunak lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan ancaman sebagai landasan operasional; (2) melakukan penataan perimbangan kekuatan personel dan alutsista antar Kotama khususnya kekuatan gelar kewilayahan, serta pemantapan Satminkal TNI

AD dengan pengendalian kekuatan personel yang konsisten; (3) melakukan penataan sistem pendidikan TNI AD dan pembenahan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi, serta akreditasi bagi pendidikan Perwira dan pendidikan vokasi berbasis keahlian bagi Bintara/Tamtama; (4) merevitalisasi sistem pembinaan latihan TNI AD untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan/satuan; (5) mengintensifkan sosialisasi dan pencerahan tentang tugas pemberdayaan wilayah pertahanan kepada seluruh prajurit dan satuan TNI AD mengacu pada undang-undang yang berlaku; (6) meningkatkan aktualisasi peran lembaga penerangan TNI AD (pusat dan daerah) untuk pembentukan opini publik.

- b. Diluar lingkungan TNI AD (eksternal) yaitu: (1) meningkatkan citra TNI AD dengan menjalin hubungan komunikasi yang erat dengan seluruh elemen masyarakat; (2) menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat/daerah (eksekutif dan legislatif) dalam rangka mewujudkan hubungan sipil-militer yang obyektif; (3) meningkatkan peran TNI AD dalam pembangunan nasional dengan memanfaatkan kemampuan profesi yang dimiliki yang diatur dengan produk legislasi yang jelas.

Lampiran 1 : Daftar Referensi**1. Buku**

Bruneau, Thomas C. & Tollefson, Scott D. (2006). *Who guards the guardians and how, Democratic civil-military relations*. USA, University of Texas Press, 24.

Baylis, John., Wirtz, James J., Cohen, Eliot & Gray, Colin S. (2002). *Osgood Strategy in the contemporary world an introduction to strategy*. United States : Oxford University Press.

Bakrie, Connie Rahakundini. (2008). *Pertahanan negara dan postur TNI ideal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 27.

Departemen Pertahanan RI. (2008). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta : Departemen Pertahanan RI, 120.

Diamond, Lary & Platner, Marce F. (2000). *Hubungan sipil-militer dan konsolidasi demokrasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 4.

Effendy, Muhadjir. (2008). *Profesionalisme militer, Profesionalisasi TNI*. Jakarta : UMM Pers, 37, 38, 40, 45-46, 255.

Huntington, Samuel. P. (2003). *Prajurit dan negara, Teori dan politik hubungan militer-sipil*. Jakarta : PT. Grasindo, 1, 3-4, 7, 8, 13, 14, 16.

Keputusan Kasad Nomor Kep/4/I/1985 tanggal 12 Januari 1985 tentang pokok-pokok organisasi dan tugas Kodam.

Keputusan Kasad Nomor Kep/4a/I/1985 tanggal 6 Juni 2001 tentang perubahan-1 pokok-pokok organisasi dan tugas Kodam.

(Lanjutan)

- La Ode, M.D. (2006). Peran militer dalam ketahanan nasional, Studi kasus bidang Hankam di Indonesia tahun 1967-2000. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mabes TNI. (1999). TNI abad XXI, redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa, 23.
- Mabesad. (2007). Benteng terakhir Indonesia. Jakarta : Mabesad, 100.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. (1992). Analisis data kualitatif : Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta : Universitas Indonesia, 15-18.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.
- Rangkuti, Freddy. (2001). Analisis SWOT teknik membedah kasus dan bisnis. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 171.
- Sun Tzu. (2003). *The art of war*. Jakarta : The Denma Translation Group, 23.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (2005), Si vis pacem para bellum. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 11.
- Susanto, Astrid S. (1985). Pengantar sosiologi dan perubahan sosial. Jakarta : Bina Cipta, 75, 77.
- Soekanto, Soerjono (1980). Sosiologi : Ruang lingkup dan aplikasinya. Bandung : PT. Remaja Karya, 27.
- Said, Salim. (2000). *Legitimizing military rule: Indonesian armed forces ideology, 1958-2000*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

(Lanjutan)

Sukma, Rizal. (1995). Pemikiran strategis Cina dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping. Jakarta : CSIS, 73-77.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Webster's New Dictionary and Thesaurus. (1990), 472.

....., (2000). *Strategy Policy : Australian Maritime Doctrine*, 29.

2. Jurnal

Marbun, Hotma. (2009). Menata postur TNI AD sesuai dengan kebijakan *minimum essential forces* guna mewujudkan daya tangkal aspek darat yang tangguh. *Majalah Yudhagama* edisi Juni 2009, 8.

3. Sumber Internet

Dispenad. (2008). Peran TNI AD. July 5, 2010. <http://www.tniad.mil.id>.

Harian Berita Sore. DPR sepakat anggaran TNI naik 10 triliun. Juny 9, 2009. <http://beritasore.com/2009/06/09/dpr-sepakat-anggaran-tni-naik-10-triliun/>.

Tippe, Syarifudin. (2006). Strategi pengembangan TNI AD 25 tahun ke depan: ditinjau dari perspektif pendidikan. December 19, 2006. <http://www.tniad.mil.id/1artikel.php?pil=1&dn=20080711015054>.